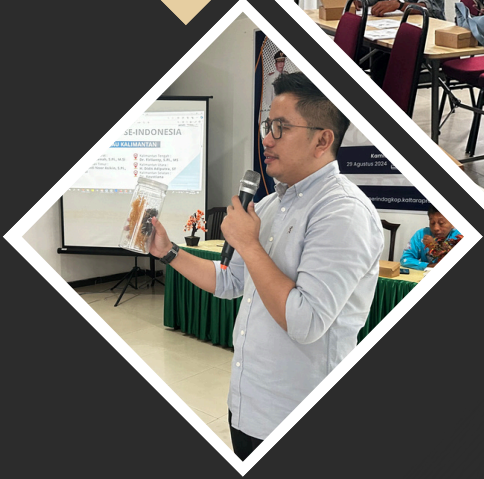




0-0-0
2024
08.00 WITA - SELESAI
HOTEL NEO FORTUNA

Disperindagkop.kaltaraprov.go.id Disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co



LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI & SINKRONISASI LAYANAN PENERBITAN SKA

TA. 2024

Disusun Oleh :

Bidang Perdagangan Luar Negeri

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROV.

KALIMANTAN UTARA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala (SWT) atas berkah dan rahmatNya maka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di daerah Provinsi Kalimantan Utara telah terselenggara dengan lancar dan bermanfaat.

Pada tanggal 20 September 2023 Presiden RI Joko Widodo membentuk satuan tugas peningkatan ekspor nasional melalui Keputusan Presiden (Kepres), hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penurunan permintaan ekspor seiring meningkatnya ancaman resesi di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi Cina yang merupakan pasar utama Indonesia. Keppres tersebut akan memperkuat berbagai upaya dan strategi Pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja ekspor Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi perlambatan permintaan ekspor di negara tujuan ekspor tradisional dengan mengeksplorasi pasar tujuan ekspor baru seperti India, Afrika, dan Amerika Latin. Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing, mengidentifikasi potensi dan memetakan produk-produk ekspor potensial Indonesia.

Melalui hal tersebut Pemerintah Daerah juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan ekspor di daerahnya masing-masing. Seperti kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui pembiayaan APBD TA. 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaku eksportir di daerah terhadap kendala serta isu-isu yang sedang berkembang di daerah sehingga dapat terfasilitasi dan tercapai sesuai target kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan dengan harapan kegiatan serupa dapat terus berlanjut disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan di daerah. Atas kepercayaan dan dukungannya kepada Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 25 Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

HERI SIAMPA, ST
NIP. 19701028 200502 2 008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN 2
C. DASAR PELAKSANAAN..... 3
D. SUMBER PEMBIAYAAN..... 4

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 5
A. JADWAL DAN SUSUNAN ACARA 5
B. PESERTA KEGIATAN 6
C. MATERI PELATIHAN DAN NARSUMBER 8
D. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 11
E. REALISASI PEMBIAYAAN KEGIATAN 12

BAB III PENUTUP 13
A. KESIMPULAN 13
B. REKOMENDASI 13

LAMPIRAN I DOKUMENTASI FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN
LAMPIRAN II MATERI PELATIHAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jadwal dan Agenda Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kab. Nunukan.....	5
Tabel 2.2	Daftar Peserta Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kab Nunukan	7
Tabel 2.3	Realisasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA TA. 2024.....	12



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekspor merupakan langkah penting yang menjadi unggulan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan gairah perekonomian di tanah air. Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan ekspor dalam negeri yaitu dengan mempermudah dan mempercepat pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor, termasuk peningkatan fasilitasi perdagangan dalam memproses perizinan ekspor-impor.

Salah satu kebijakan dalam perdagangan luar negeri Indonesia dan menjadi kesepakatan dalam perdagangan internasional yaitu melalui penerbitan SKA atau *certificate of origin (COO)*. Dokumen SKA menegaskan komoditas ekspor tersebut berasal dari Indonesia. Hal tersebut juga mempertaruhkan kualitas dan nama baik Indonesia, melalui penerbitan SKA diharapkan memberi kemudahan serta keamanan bagi para eksportir dengan fasilitas pengurangan bea masuk barang, kejelasan asal barang, dan kemudahan pelacakan terhadap tuduhan *dumping*.

Berdasarkan data Ekspor yang dipublish oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, mencatat akumulasi nilai ekspor nonmigas Indonesia ke negara tujuan utama mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, yakni dengan total 2.861.780 Juta USD dimana total ekspor Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 hanya sebesar 2.564.420 Juta USD, hal tentunya disebabkan beberapa faktor seperti merosotnya harga komoditas ekspor unggulan nasional seperti komoditas migas dan nonmigas. Selain itu juga karena tersendatnya permintaan negara mitra dagang utama Indonesia sehingga menghambat laju ekspor.

Provinsi Kalimantan Utara yang melimpah dengan hasil kelautannya salah satunya rumput laut yang dimana menjadi pemasok terbesar ke 2 di dunia setelah Tiongkok, dengan angka produksi sebesar 27,5 % dari total produksi rumput laut pada tahun 2020. Khusus wilayah kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan perdagangan luar negeri salah satunya hasil rumput laut, sehingga potensi rumput laut yang ada disana juga sangatlah besar. Namun masih terdapatnya kendala yang dihadapi seperti belum terdapat teknologi yang memadai untuk mengukur kadar air pada rumput laut menjadikan kendala ketika ingin diekspor, serta masih banyaknya hasil rumput laut yang dijual ke luar daerah seperti Surabaya dan Makassar sehingga hasil ekspor tersebut tidak tercatat di Kalimantan Utara.



Peningkatan ekspor menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, yang mana juga merupakan salah satu nawacita pemerintah Indonesia yakni membangun Indonesia melalui wilayah perbatasan, sehingga kegiatan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA yang dilaksanakan pada tahun ini ditujukan untuk memfasilitasi para pelaku usaha rumput laut yang ada di Provinsi Kalimantan Utara agar dapat menjadi salah satu komoditi unggulan serta berkontribusi pada ekspor komoditi di wilayah Kalimantan Utara.

Pemerintah menyusun strategi demi membantu eksportir dalam meningkatkan ekspor nasional. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi eksportir terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka materi dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Provinsi Kalimantan Utara membahas mengenai “Fasilitasi Pengembangan Pasar Ekspor Komoditi Rumput Laut di Wilayah Kalimantan Utara”. Melalui forum ini diharapkan dapat terciptanya koordinasi dan sinkronisasi antara stakeholder terkait dengan pelaku usaha dalam penyampaian strategi maupun upaya pemerintah dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan ekspor di wilayah Kalimantan Utara.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Provinsi Kalimantan Utara TA. 2024 sebagai berikut :

- 1) Terjalannya sinergi antara Stakeholder teknis terkait dengan pelaku usaha rumput laut, demi meningkatkan nilai ekspor daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional khususnya pada komoditi rumput laut;
- 2) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di daerah, dalam rangka peningkatan ekspor dan pengelolaan impor untuk memperkuat perekonomian domestik;
- 3) Dukungan monitoring dan evaluasi penerbitan Surat Keterangan Asal dalam rangka pembinaan dokumen/surat terkait ekspor impor di daerah yang diterbitkan, dengan target 80% *form* Surat Keterangan Asal digunakan oleh Pelaku usaha ekspor, dan 80% angka pengenalan impor sesuai dengan ketentuan berlaku;
- 4) Untuk mengumpulkan data/informasi terkait pelaksanaan serta penyelesaian permasalahan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) di daerah. Dalam



rangka mendukung optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor tersebut, perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta program yang ditetapkan oleh pusat yang dilaksanakan di daerah, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, akan diperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah terutama kinerja ekspor atau impor yang produknya diatur. Data/informasi yang diperoleh dan daerah selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri;

- 5) Mendukung terlaksananya pelimpahan tugas/wewenang di bidang perdagangan luar negeri yang meliputi dan tidak terbatas pada monitoring/ evaluasi penerbitan dokumen ekspor dan impor (SKA) serta penyebarluasan informasi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan dan bimbingan teknis terkait kebijakan, komoditi dan isu terkini di bidang perdagangan luar negeri;
- 6) Dalam rangka mendukung optimilisasi pengelolaan ekspor dan impor, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi keselarasan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pusat dengan pelaksanaannya di daerah, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi didalam implementasi kebijakan di daerah dapat segera tangani dan ditindaklanjuti.

C. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) ini berdasarkan peraturan-perundangan, sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) DPA Program 3.30.02 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Kegiatan 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) Sub Kegiatan 3.30.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan
- 4) SKA;
- 5) Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1030 Tahun 2022 tentang Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal;
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.



D. Sumber Pembiayaan

Kegiatan ini dibebankan pada Dana APBD DPA Program 3.30.02 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Kegiatan 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) Sub Kegiatan 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA.



BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jadwal dan Susunan Acara

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kab. Nunukan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Tempat : Ruang Rapat Hotel Neo Fortuna, Kab. Nunukan

Dengan Susunan Acara kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Daerah Provinsi Kalimantan Utara, disusun sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jadwal dan Agenda Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kab. Nunukan

JADWAL TENTATIF
KOORDINASI DAN SINKRONISASI LAYANAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL (SKA) TA. 2024

WAKTU	DURASI	ACARA	KET
07.30 – 08.00	30'	Registrasi Peserta	MC
08.00 – 08.10	10'	Pembukaan	
	5'	Laporan Ketua Panitia	
	5'	Sambutan dan Pembukaan	
08.10 – 08.20	10'	Coffee Break	Seluruh Peserta
08.20 – 10.20	(120')	Penyampaian Materi dan Diskusi Pemaparan materi oleh Reni Tri Cahyani, S.Pi, M.Si,MM Akademisi Universitas Borneo Tarakan	Moderator
10.20 – 12.20	(120')	Penyampaian Materi dan Diskusi Pemaparan Materi oleh Lazuardy Tembang Smaradhana, S.TP, MT Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan RI	Seluruh Peserta
12.20 – 12.50	30'	ISHOMA	Panitia
12.50 – 14.50	(120')	Penyampaian Materi dan Diskusi Pemaparan materi oleh Darmansyah, S.Pi Balai Pengendalian, Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan	Moderator
14.50 – 16.50	(120')	Penyampaian Materi dan Diskusi Pemaparan materi Didit Adiputra, ST Ketua Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan	Seluruh Peserta



		Indonesia (MPHPI)	
16.50 – 17.00	10'	Penutupan	Panitia

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan tema “Fasilitasi Pengembangan Pasar Ekspor Komoditi Rumput Luat di Wilayah Kalimantan Utara” di Kab. Nunukan yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2024 dibuka oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku usaha, organisasi perangkat daerah terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan serta peserta lainnya dari instansi terkait dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana undangan peserta terpenuhi dari instansi vertikal seperti Bea dan Cukai, dan para Pelaku Usaha ekspor dan impor se-Kaltara.

Menyesuaikan keterbatasan waktu pelaksanaan acara untuk pemanfaatan sewa Ruang Pertemuan (*System Fullday Meeting*), maka pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Daerah menggunakan metode diskusi panel.

B. Peserta Kegiatan

Jumlah aparatur daerah dan pelaku usaha yang terlibat dalam Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah sebanyak 48 peserta. Dalam menentukan peserta kegiatan dari unsur pelaku usaha maka terdapat kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan petunjuk teknis yaitu :

- Perusahaan komoditi perikanan pengguna Surat Keterangan Asal (SKA);
- Stakeholder/intansi terkait lainnya;
- Pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
- Nelayan rumput laut yang ada di Kab. Nunukan.

Daftar peserta kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 melalui tabel sebagai berikut :



Tabel 2.2
Daftar Peserta Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal
(SKA) di Kab Nunukan

NO	NAMA INSTANSI / PERUSAHAAN	Jumah Peserta
1	Kepala Dinas Perikanan Kab. Nunukan	1 (Satu) Orang
2	Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan	1 (Satu) Orang
3	Kepala Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Nunukan	1 (Satu) Orang
4	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tarakan	1 (Satu) Orang
5	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kab. Nunukan	1 (Satu) Orang
6	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan	1 (Satu) Orang
7	Kepala Balai Pengendalian, Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan	1 (Satu) Orang
9	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kab. Nunukan	1 (Satu) Orang
10	Pimpinan PT. Pelindo Nunukan	1 (Satu) Orang
11	Kepala Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sebatik	1 (Satu) Orang
12	Ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut Kaltara	1 (Satu) Orang
13	PT. Alima Berkah Bersama;	1 (Satu) Orang
14	PT. Kotonik Berkat Nusantara;	1 (Satu) Orang
15	PT. Siemsa Nunukan Indonesia;	1 (Satu) Orang
16	CV. Berkah Nagari Nusantara;	1 (Satu) Orang
17	Koperasi Hasil Berkat Lautan Indonesia	1 (Satu) Orang
18	CV. Segara Kausa Indonesia	1 (Satu) Orang
19	PT. Seaweed Jaya Indonesia	1 (Satu) Orang
20	PT. Maa Ataita Indah	1 (Satu) Orang
21	PT. Runi Jaya Sentosa	1 (Satu) Orang
22	PT. Kebula Raya Bestari	1 (Satu) Orang
23	Bpk. H. Arisa	1 (Satu) Orang
24	Bpk. Imran	1 (Satu) Orang
25	Bpk. Sainal	1 (Satu) Orang
26	Bpk. Kamaruddin	1 (Satu) Orang
27	Bpk. Suardi	1 (Satu) Orang
28	Bpk. Anwar	1 (Satu) Orang
29	Bpk. Uci	1 (Satu) Orang
30	Bpk. Nasrun	1 (Satu) Orang



31	Bpk. Idris	1 (Satu) Orang
32	Bpk. Joko	1 (Satu) Orang
33	Bpk. H. Kamaruddin	1 (Satu) Orang
34	Bpk. Sakir	1 (Satu) Orang
35	Bpk. Nardi	1 (Satu) Orang
36	Bpk. H. Afrisal	1 (Satu) Orang
37	Bpk. Ansar	1 (Satu) Orang
38	Bpk. Kamaluddin	1 (Satu) Orang
39	Bpk. Firman.	1 (Satu) Orang
40	Bpk. Sudi	1 (Satu) Orang
41	Bpk. Alias	1 (Satu) Orang
42	Bpk. Asri	1 (Satu) Orang
43	Bpk. H. Rafi	1 (Satu) Orang
44	Bpk. H.Supa	1 (Satu) Orang
45	Bpk. H. Fuding	1 (Satu) Orang
46	Bpk. Luknan	1 (Satu) Orang
47	Ibu Hj. Ros	1 (Satu) Orang
48	Bpk. Riko	1 (Satu) Orang

C. Materi Pelatihan dan Narasumber

Pemilihan materi pelatihan didasari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perdagangan luar negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya terkait permasalahan upaya meningkatkan kapasitas pemahaman terhadap permasalahan perdagangan luar negeri lingkup wilayah provinsi sebagai daerah perbatasan dan lingkup nasional/internasional, permasalahan kesamaan pemahaman peraturan, koordinasi dan dinamika perkembangan perdagangan luar negeri, masalah keterbatasan informasi peluang pasar produk Indonesia di luar negeri, dan penyampaian materi terkait strategi dan upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional melalui pengembangan sektor perikanan di wilayah Kalimantan Utara salah satunya komoditi rumput laut.

- a. Narasumber pertama yang menyampaikan materi yaitu Ibu Reni Tri Cahyani, S.Pi, M.Si., MQM sebagai Akademisi dari Universitas Borneo yang bertema “Daya Saing Rumput Laut Kaltara di Pasar Ekspor”, dengan rangkuman materi sebagai berikut : Pada kesempatan ini beliau menyampaikan materi berkaitan dengan pengetahuan umum mengenai rumput laut di wilayah Kaltara seperti HS Code rumput laut



beserta turunannya, jenis-jenis rumput laut yang diperdagangkan di dunia, biorifernery rumput laut. Selain itu beliau juga menyampaikan terkait nilai ekspor rumput laut Indonesia dimana menurut data ITC mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 275 Ribu USD dibanding tahun 2022 sebesar 388 Ribu USD hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor utama seperti rendahnya kualitas yang dipengaruhi polusi laut serta kadar air yang masih tinggi menurunkan permintaan dari negara mitra, selain itu faktor lainnya terakait masalah persaingan global yang semakin meningkat, masalah infrastruktur dan logistik pengiriman, serta regulasi dan kebijakan pemerintah.

Daya saing rumput laut kaltara dibandingkan wilayah Indonesia lainnya berada di peringkat 3 dengan produksi sebesar 788.968 Ton dibawah dari NTT 1.403.336 Ton dan Sulawesi Selatan 3.796.881 Ton. Sebenarnya produksi rumput laut Kaltara yang termasuk yang paling besar hanya saja karena terkendala di infrastruktur dan akses pengiriman untuk ekspor jadi para nelayan rumput laut lebih memilih menjual rumput lautnya ke tengkulak yang nantinya para tengkulak-tengkulak ini yang akan mengirim keluar daerah seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur untuk diekspor.

- b. Pemaparan Materi yang kedua oleh Lazuardy Tembang Smaradhana, S.TP, MT Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan RI dengan tema “Fasilitasi Pengembangan Pasar Eskpor Komoditi Rumput Laut di Wilayah Kalimantan Utara” dengan rangkuman materi sebagai berikut :

Pada kesempatan ini Bpk. Lazuardy menyampaikan eksport rumput laut Indonesia secara luas melalui regulasi, statistik, serta potensi. Untuk saat ini terdapat 20 negara tujuan ekspor rumput laut Indonesia dimana yang terbesar ada di RRT, AS, dan Jepang. Ada beberapa upaya pengamanan terhadap akses pasar ekspor untuk komoditi rumput laut oleh Pemerintah seperti, Pembelaan secara teknis dan politis, penggunaan scientific evidence, penggalangan stakeholder, dan koordinasi dengan stakeholder di dalam negeri. Pada kesempatan ini Bpk. Lazuardy juga menyampaikan betapa pentingnya resi gudang dalam upaya peningkatan produksi rumput laut Kaltara, dimana resi gudang bisa menjaga kualitas rumput laut, meningkatkan harga jual sehingga menjamin kesejahteraan nelayan rumput laut. Di Kaltara sendiri sudah ada beberapa resi gudang untuk komoditi perikanan yang telah mendapat persetujuan BAPPEBTI, seperti PT. Tarakan Fisherindo Sipatuo, PT. Sabindo Raya Gemilang, dan PT. Bunga Laut Samudera Jaya, hanya saja SRG tersebut masih berada di wilayah Tarakan



sedangkan produksi terbesar itu di wilayah Kab. Nunukan, ini yang menjadi perhatian kedepannya agar para stakeholder terkait.

- c. Narasumber selanjutnya yaitu Bpk. Darmansyah, S.Pi dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan tema “Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Komoditi Rumput Laut”, dengan rangkuman materi sebagai berikut :

Dalam paparannya Bpk. Darmansyah menjelaskan mengenai arah kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan diantaranya perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis, pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pascapanen, pengawasan mutu domestik, peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan negara tujuan ekspor, serta peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu. Hal-hal lain yang disampaikan Bpk. Darmansyah terkait para pengusaha Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL) mengatasmakan ARLI mengusulkan bahwa sertifikasi HACCP untuk produk rumput laut berupa bahan baku dalam bentuk kering (raw non food) tidak bisa disamakan dengan HACCP untuk tujuan konsumsi, berkenaan usulan tersebut Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu menampung dan sedang mendiskusikan dgn tim teknis pusat terkait Sertifikasi HACCP Produk Rumput Laut (Raw RL non food). Kepala BPPMHKP menegaskan untuk selalu menjaga K3 dgn semua stakeholder terkait untuk menjaga kelancaran ekspor rumput laut. Dalam Hal kegiatan ekspor hasil perikanan termasuk rumput laut kering dibagi dalam 2 bagian penjaminan mutu, yaitu Border (BPPMHKP) dan Post Border (BARANTIN), Kedepannya seluruh ekspor hasil perikanan termasuk rumput laut UPI/UPRL akan diberikan SKIHP (Sertifikat Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan) dan selanjutnya SPM (surat persetujuan muat) akan dihapus. Selanjutnya hasil K3 dgn Barantin, terkait ekspor Rumput Laut kering BARANTIN akan mengeluarkan sertifikat karantina ikan dan sertifikat phytosanitary, untuk melayani pengusaha baru yg akan melayani sampel produk ke buyer tetap akan dilayani pemberian Sertifikat kesehatan (HC) namun harus dikomunikasikan sebaik2nya dgn buyer bahwa tanpa sertifikat HACCP dipastikan aman sampai di negara tujuan. Sehubungan dgn pelayanan sertifikasi SKP dan HACCP Kedepan dalam satu badan yaitu BPPMHKP maka kebijakan Ibu Kepala Badan 2 sertifikasi ini akan di jadikan satu kegiatan utk menerbitkan 2 sertifikasi sekaligus.

- d. Sebagai penutup sesi penyampaian materi yang dibawakan oleh Praktisi dan Penggiat Rumput Laut di Kaltara yang juga sebagai ketua Pengurus Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (PMPHPI) di Wilayah Kalimantan Utara



Bpk. Didit Adiputra, ST, pada kesempatan ini beliau banyak menyampaikan terkait pengolahan raw material dari rumput laut menjadi end product yang dapat menambah nilai jual menjadi lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar menjual raw material. Bpk. Didit juga menjelaskan sudah terdapat beberapa perusahaan di Luar Kaltara yang sudah mengembangkan rumput laut menjadi beberapa produk seperti pupuk, garam, selai serta produk-produk lainnya. Hal ini yang disampaikan kepada para pengusaha rumput laut di Kaltara agar dapat berinovasi kedepannya untuk mengolah rumput laut menjadi olahan produk yang berjual nilai tinggi.

D. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Capaian Target Kegiatan

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan target kegiatan peserta sebanyak 40 peserta dari Kab. Nunukan terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha dan instansi/lembaga terkait lainnya, dan pelaksanaannya di bulan Agustus 2024. Pada kegiatan ini jumlah undangan yang disebarkan sebanyak 47 undangan, terdiri dari :

- 11 Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait;
- 10 Perusahaan Eksportir Rumput Laut;
- 26 Nelayan Rumput Laut.

Berdasarkan hasil pelaksanaan maka dapat dikatakan capaian melebihi target dan waktu pelaksanaan tanggal 29 Agustus 2024 di Kab. Nunukan telah sesuai dengan Juknis.

2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA di Kabupaten Nunukan untuk Komoditi Rumput Laur, terdapat hal-hal yang perlu disampaikan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai juknis dengan cara *fullday meeting*, dianggap efektif karena menggunakan sistem diskusi panel antara narasumber dengan peserta undangan;
- b. Tema yang diangkat sudah sangat sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, terlebih beberapa tahun kebelakang komoditi rumput laut mengalami permasalahan khususnya terkait harga yang semakin menurun sehingga kegiatan ini dianggap tepat guna menanggapi isu-isu yang sedang berkembang serta penanganan permasalahannya;
- c. Penentuan lokasi kegiatan di Kabupaten Nunukan merujuk pada juknis kegiatan juga lokasi IPSKA dan penyumbang produksi rumput laut terbesar.



E. Realiasi Pembiayaan Kegiatan

Kegiatan ini dibebankan pada Sumber Dana APBD DPA Program 3.30.02
Program : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
Kode Rekening : 3.30.02.1.04.0001

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) mengacu pada ketersediaan anggaran dalam DPA Disperindagkop dan UKM Prov. Kaltara dan menyesuaikan dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara *fullday meeting* dengan penambahan waktu menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan anggaran pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA ini dari jumlah pagu Rp. 100.069.664 dengan jumlah pagu yang terealisasi sebesar Rp. 99.842.239 atau 99.77 % dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 227.425. Detailnya akan dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 2.3
Realisasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA TA. 2024

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 871.836	Rp. 855.000	Rp.16.836
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. -	Rp. -	Rp. -
3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 77.747.239	Rp. 77.747.239	Rp. 589
4.	Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 100.069.664	Rp. 99.842.239	Rp. 210.000
TOTAL		Rp. 100.069.664	Rp. 99.842.239	Rp. 227.425



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 telah terlaksana dengan baik yaitu sesuai dengan maksud tujuan, sasaran, serta pemanfaatan pembiayaan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaannya dan standarisasi yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para peserta dalam rangka meningkat kapasitas pelaku usaha serta SDM stakeholder dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Beberapa hal penting sebagai hasil pelaksanaan kegiatan disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kegiatan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan sangat diminati para peserta/undangan sehingga paparan materi yang disampaikan benar-benar mendapat perhatian yang baik dari para peserta hingga berakhirnya acara yang sudah dijadwalkan.
- 2) Para peserta yang menghadiri baik dari lingkup Stakeholder terkait, instansi vertikal, serta dari para pelaku usaha (eksportir) umumnya memang personil yang membidangi sehingga dapat memahami paparan yang disampaikan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan sangat bermanfaat bagi para peserta sesuai permasalahan dalam perdagangan luar negeri yang saat ini dibutuhkan oleh aparaturnya maupun para pelaku ekspor dan impor di Provinsi Kalimantan Utara. Melalui kegiatan ini juga kepada para peserta telah diberikan paparan dan tanggapan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku serta informasi yang belum tersampaikan secara komprehensif kepada para pelaku usaha.

B. Rekomendasi

Untuk efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran dan target yang diharapkan, khususnya dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Daerah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dirasakan sangat bermanfaat dan perlu dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan tersebut tidak hanya



sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku usaha tetapi sekaligus sebagai wadah koordinasi lintas sektor terkait perdagangan luar negeri di daerah.

- 2) Waktu pelaksanaan yang pada tahun sebelumnya hanya *halfday* pada tahun ini ditingkatkan menjadi *fullday* dan hal tersebut sangat tepat karena keterbatasan waktu terkadang menjadi pemutus diskusi antara peserta dengan para narasumber yang ada, sehingga dengan diberikannya anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan secara *fullday* menjadikan kegiatan tahun ini dianggap lebih efektif secara teknis dan non teknis.
- 3) Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Daerah di Provinsi Kalimantan Utara TA. 2024 dianggap sudah sangat efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena terdapat penambahan anggaran sehingga pelaksanaan bisa menggunakan skema *fullday* serta tahun ini kami juga memfokuskan pada satu komoditi unggulan yaitu rumput laut sehingga pembahasan bisa lebih terfokus dan tidak melebar kemana-mana. Hal ini tentu perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Tanjung Selor, 25 Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

HERI SIAMPA, ST

NIP. 19701028 200502 2 008



LAMPIRAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah yang telah
ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan API
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)



Melalui Dukungan

SOSIALISASI SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)
“Fasilitasi Pengembangan Pasar Ekspor Komoditi Rumput Laut di
Wilayah Kalimantan Utara”

BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TA. 2024



LAMPIRAN I

DOKUMENTASI FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN
Foto pelaksanaan kegiatan



NO.	FOTO KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA dilaksanakan pada Kamis, 29 Agustus 2024 di Hotel Neo Fortuna Kab Nunukan dengan tema “Fasilitasi Pengembangan Pasar Ekspor Komoditi Rumput Laut di Wilayah Kalimantan Utara”.
2.		Para peserta kegiatan FGD yang hadir.
3.		Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri menyampaikan sambutan.



4.		Narasumber pertama Ibu Reni Tri Cahyani, S.Pi, M.Si., MQM sebagai Akademisi dari Universitas Borneo yang bertema “Daya Saing Rumput Laut Kaltara di Pasar Ekspor”,
5.		Pemaparan Materi yang kedua oleh Lazuardy Tembang Smaradhana, S.TP, MT Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan RI dengan tema “Fasilitasi Pengembangan Pasar Ekspor Komoditi Rumput Laut di Wilayah Kalimantan Utara”
6.		Narasumber selanjutnya yaitu Bpk. Darmansyah, S.Pi dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan tema “Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Komoditi Rumput Laut”.



7.		Sebagai penutup sesi penyampaian materi yang dibawakan oleh Praktisi dan Penggiat Rumput Laut di Kaltara yang juga sebagai ketua Pengurus Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (PMPHPI) di Wilayah Kalimantan Utara Bpk. Didit Adiputra, ST
8.		Gambaran diskusi panel antara peserta dan para narasumber saat kegiatan berlangsung, kesempatan ini dimanfaatkan untuk menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi atau hal-hal terkait lainnya dengan para narasumber yang membidangi.





LAMPIRAN II

MATERI KEGIATAN

Materi Narasumber



MATERI KEGIATAN
“Daya Saing Rumput Laut Kaltara di Pasar Ekspor”



Daya Saing Rumput Laut Kaltara di Pasar Ekspor

Reni Tri Cahyani, S.Pi., M.Si., MQM

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

Pasar Ekspor Rumput Laut

Rank 4

[Share : 7,9%]

Top 5 Importers:
China, USA, UK,
Canada, Netherland



HS 130239

Karaginan



HS 121221

Rumput Laut layak
konsumsi manusia

Rank 2

[Share : 33,6%]

Top 5 Importers:
China, Vietnam,
Korea, Chile, Japan



HS 130231

Agar-agar

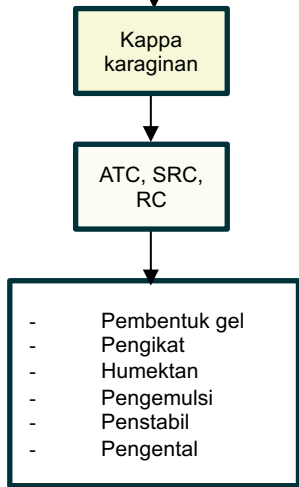
Rank 5

[Share : 6,2%]

Top 5 Importers:
China, Japan, Italy,
India, USA

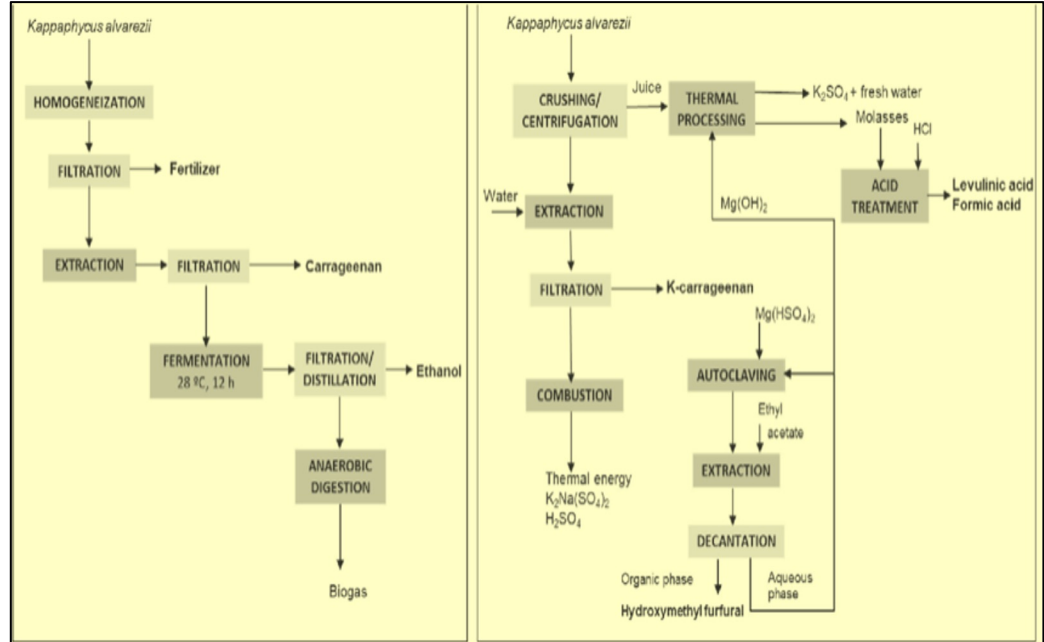
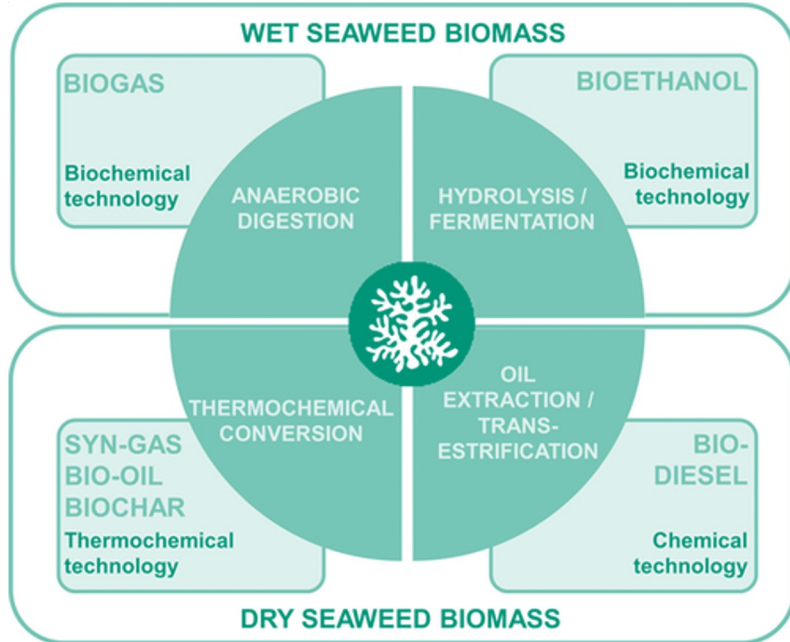
Sumber: ITC, Data 2023

Jenis Rumput Laut yang Diperdagangkan di Dunia



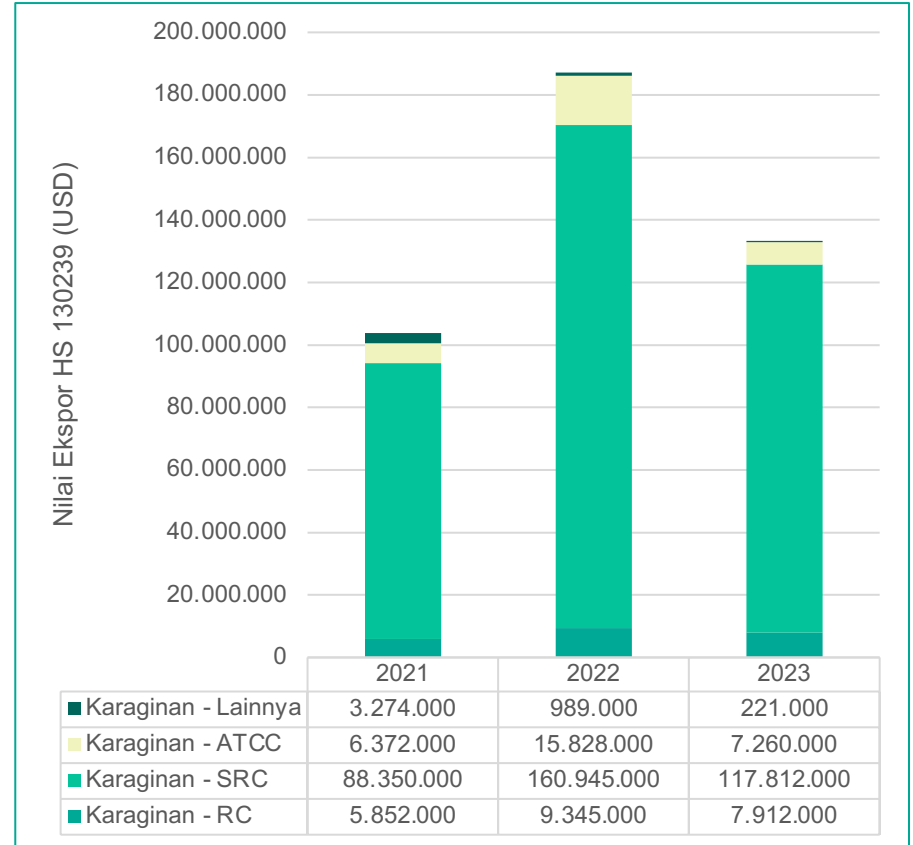
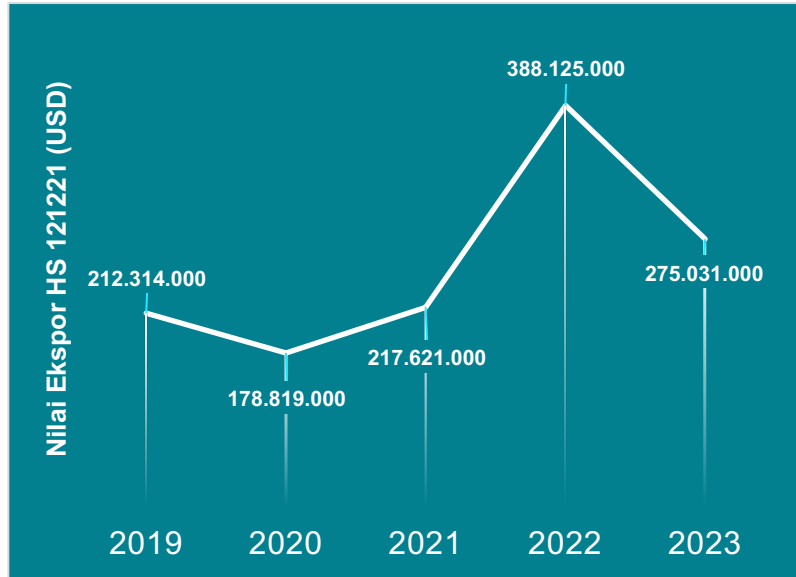
Spesies	Tipe	Kondisi Budidaya	Produsen Utama	Kegunaan
<i>Laminaria spp</i>	Coklat	Sedang	China, Korea, Jepang, Denmark	Pangan
<i>Saccharina spp</i>	Coklat	Sedang	China, Korea, Jepang, Norwegia	Pangan
<i>Porphyra spp</i>	Merah	Sedang	Jepang, China, Korea, Filipina, Kanada, Portugal	Pangan
<i>Kappaphycus alvarezii</i>	Merah	Tropical	Indonesia, Filipina, China, Tanzania, Vietnam	Hydrocolloid (Carrageenan)
<i>Eucheuma</i>	Merah	Tropical	Indonesia, Filipina, Malaysia, Tanzania, Madagascar	Hydrocolloid (Agar, Carrageenan)
<i>Gracilaria spp</i>	Merah	Tropical	China, Vietnam, Indonesia	Pangan, Hydrocolloid (Agar)
<i>Caulerpa spp</i>	Hijau	Tropical	Filipina, Vietnam, Bangladesh	Pangan
<i>Sargassum spp</i>	Coklat	Tropical	China, Vietnam, Filipina, Jepang , Korea	Pangan, Alginat

Biorefineri Rumput Laut



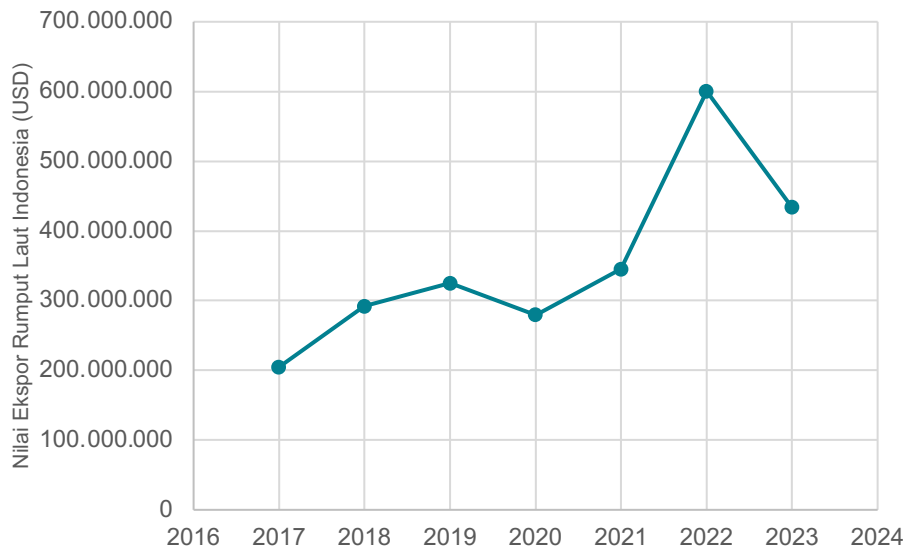
Sumber: Michalak (2018); Alvares-Vinas et al. (2019)

Nilai Ekspor Rumput Laut Indonesia



Sumber: ITC, Data 2019-2023

Ekspor Rumput Laut Indonesia

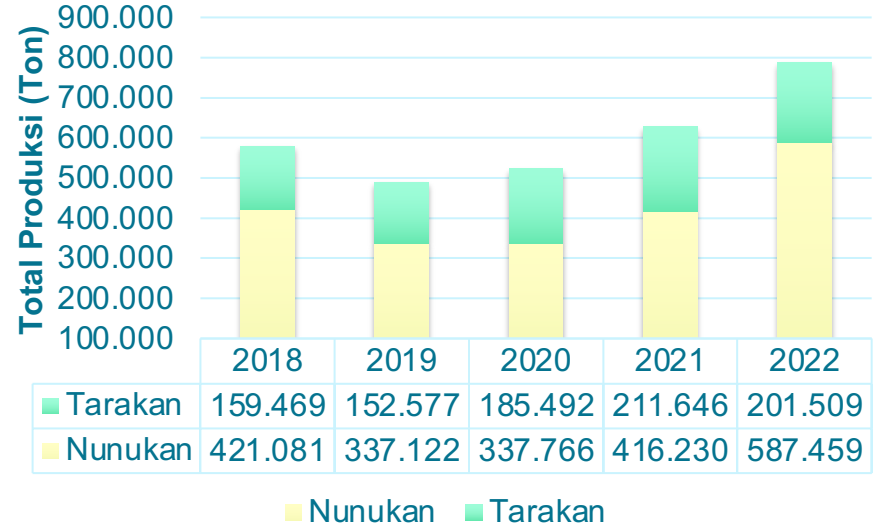
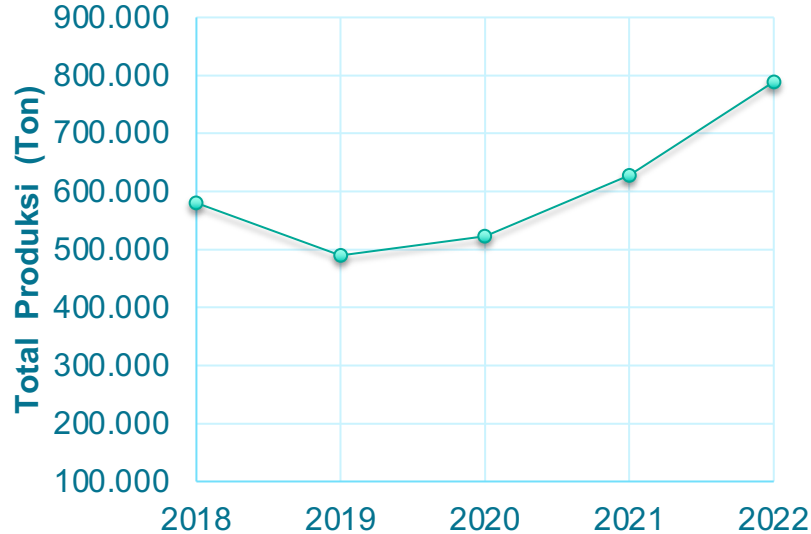


Kisaran harga RL 2022 : USD 1.744/Ton

Tahun	Nasional	Kaltara
2020	Rp. 9.535	Rp. 8.945
2021	Rp. 9.684	Rp. 5.112
2022	Rp. 9.101	Rp. 9.569
2023	Rp.10.166	Rp.8.885

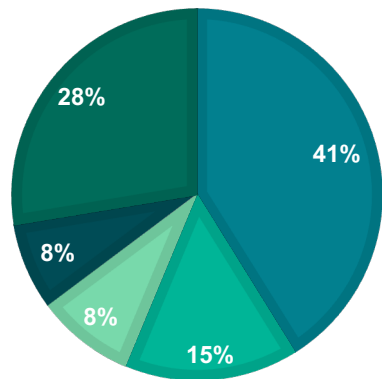
Harga Rumput Laut Tingkat Produsen

Produksi Rumput Laut Kaltara



Sumber: BPS Prov. Kaltara (2020-2024)

Daya Saing Rumput Laut Kaltara di Indonesia



■ Sulsel
■ NTT
■ Kaltara
■ NTB
■ Wilayah Lainnya

1

Sulawesi Selatan

3.796.881 Ton ⬆️ 15,42%

2

Nusa Tenggara Timur

22,20% ⬇️ 1.403.336 Ton

3

Kalimantan Utara

788.968 Ton ⬆️ 35,90%

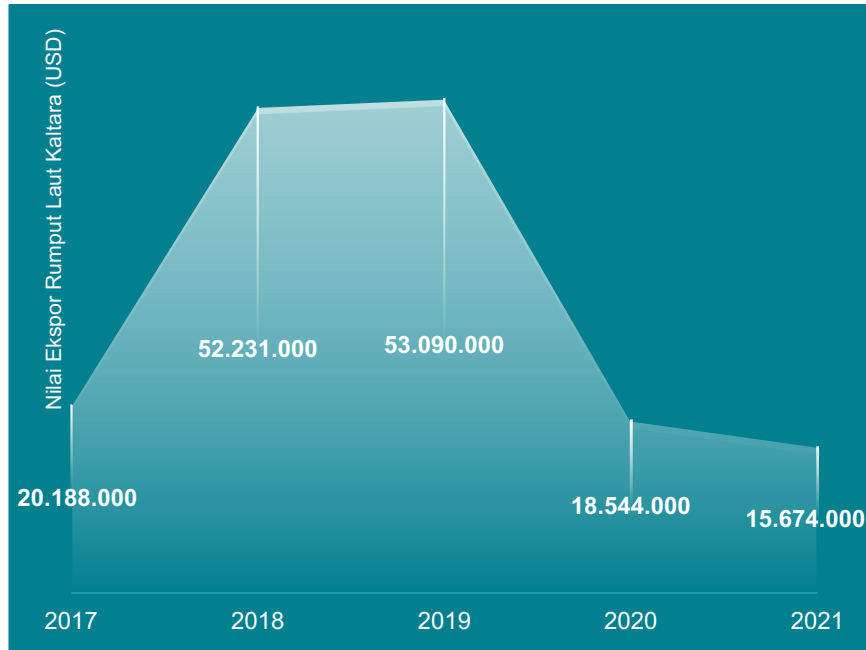
4

Nusa Tenggara Barat

20,45% ⬇️ 696.766 Ton

Sumber: Statistik KKP 2018-2022

Daya Saing Rumput Laut Kaltara di Indonesia



Tahun	Revealed Comparative Advantage (RCA)
2017	15,72
2018	24,00
2019	21,37
2020	10,09
2021	5,65

Sumber: Litbang Bappeda Kaltara-UBT (2022)

Permasalahan Mutu Rumput Laut Kering Kaltara

Kadar Air Tinggi

Kurang maksimalnya proses pengeringan menyebabkan kadar air masih tinggi

Kadar Karaginan Rendah

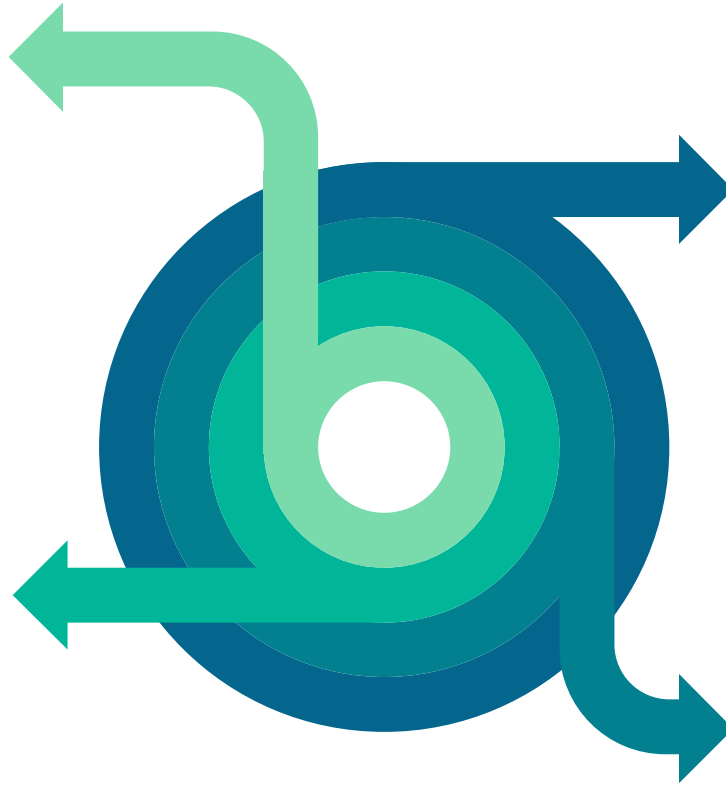
Umur panen belum mencukupi berpengaruh terhadap rendemen produk

Terdapat Pengotor/Lumut

Pengotor yang tinggi dan keberadaan lumut dapat mempengaruhi mutu produk olahan

Mutu tidak Konsisten

Harga menjadi rendah, meningkatkan biaya proses produksi

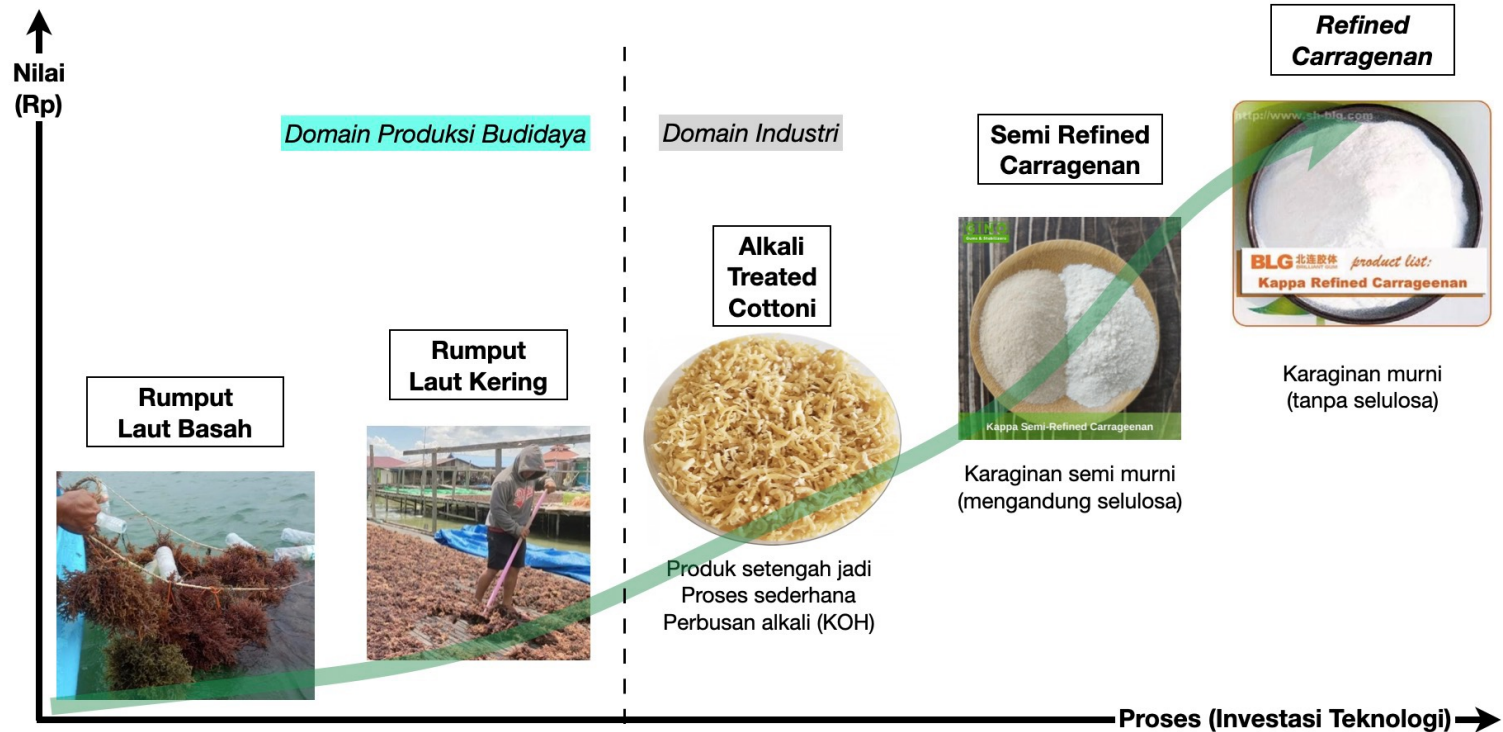


Persyaratan Mutu dan Keamanan Rumput Laut *K. alvarezii* Kering (SNI 2690: 2015)

Parameter	Nilai	Spesifikasi	Nilai
Sensori	Min 7 (Skor 1-9)	Kenampakan	
Kimia	Maks 30 % Min 50 %	- Bersih, warna cerah spesifik jenis	9
		- Sedikit kurang bersih, warna kurang cerah spesifik jenis	7
		- Kurang bersih, warna agak kusam spesifik jenis	5
Weed (CAW)	1,0 mg/kg 0,1 mg/kg 0,5 mg/kg 40 mg/kg 0,3 mg/kg	- Kotor, warna spesifik jenis	3
		- Kotor, warna spesifik jenis, sangat kusam	1
		Tekstur	
		- Kering merata, liat tidak mudah dipatahkan	9
		- Kering kurang merata, liat tidak mudah dipatahkan	7
		- Lembab, liat agak mudah dipatahkan	5
Cemaran Logam		- Mudah dipatahkan	3
		- Mudah sekali dipatahkan	1
Cemaran fisik			
- Impurites kasar	Maks 3,0 %		

Sumber: BSN (2015)

Peningkatan Nilai Tambah Rumput Laut Kaltara



Strategi Peningkatan Daya Saing Rumput Laut Kaltara di Pasar Ekspor



Peningkatan Mutu Rumput Laut

Perbaikan dalam proses budidaya & penanganan rumput laut oleh Pembudidaya/ pelaku usaha



Perbaikan Proses Bisnis

Perijinan: Persetujuan kesesuaian data kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) & Legalitas Usaha; aktivasi peran SRG dan Lab Uji Mutu Bappebti; Penyiapan Pasar



Peningkatan Keterlibatan Pelaku Usaha

Pemenuhan persyaratan untuk kegiatan ekspor; Penguatan peran SKPT sebagai fasilitator ekspor komoditas KP



Peningkatan Nilai Tambah

Pembangunan industri pengolahan rumput laut shg komoditas tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah tetapi juga barang setengah jadi/jadi



Terima Kasih



Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

MATERI KEGIATAN

***“Fasilitasi Pengembangan Pasar Eskpor Komoditi Rumput Laut di
Wilayah Kalimantan Utara”***

EKSPOR KOMODITAS RUMPUT LAUT INDONESIA

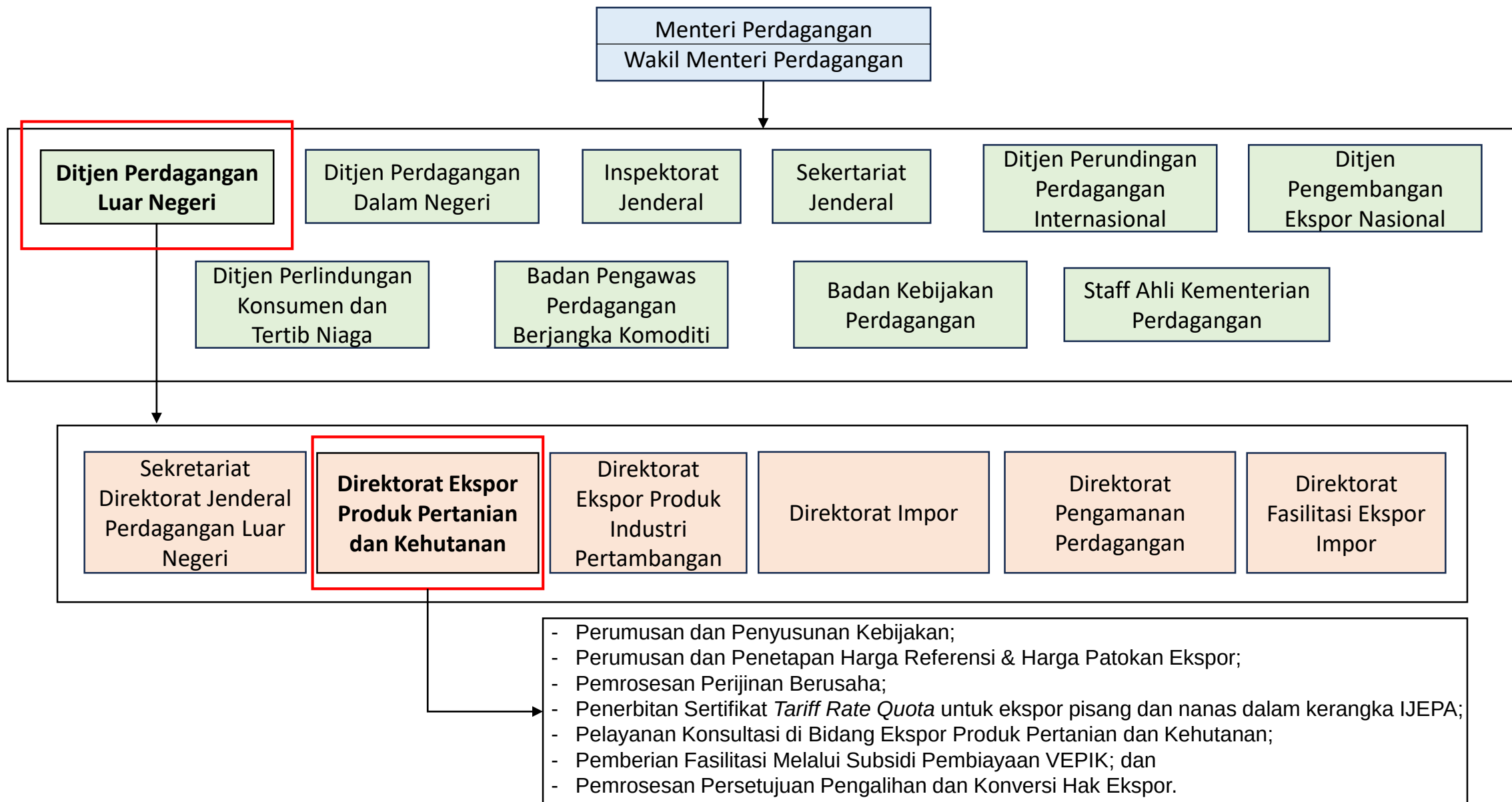
Fasilitasi Pengembangan Pasar Ekspor Komoditi
Rumput Laut di Wilayah Kalimantan Utara

29 Agustus 2024

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
2024



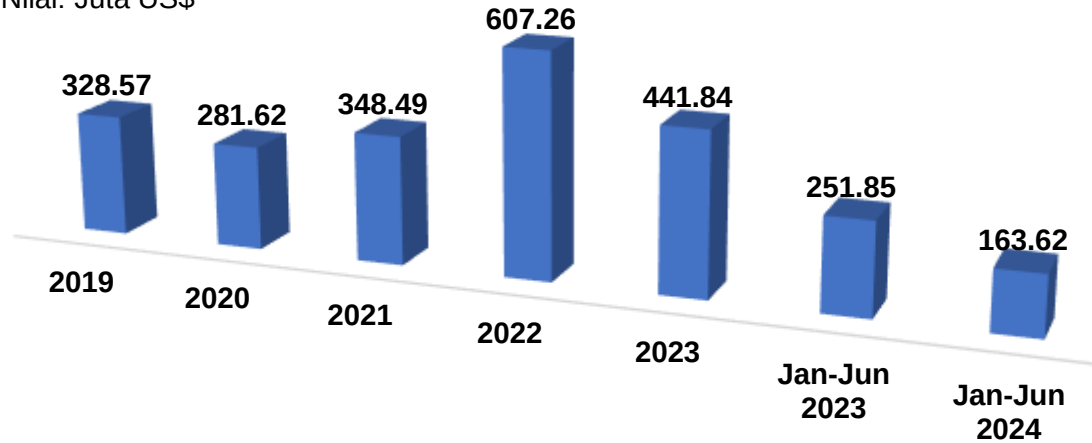
STRUKTUR ORGANISASI



KINERJA EKSPOR RUMPUT LAUT INDONESIA

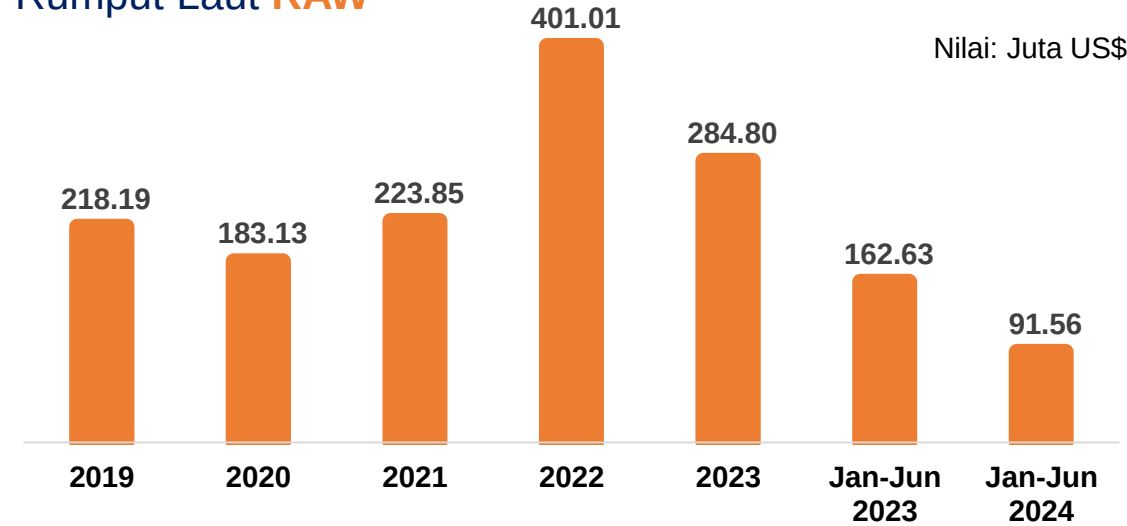
Rumput Laut TOTAL

Nilai: Juta US\$



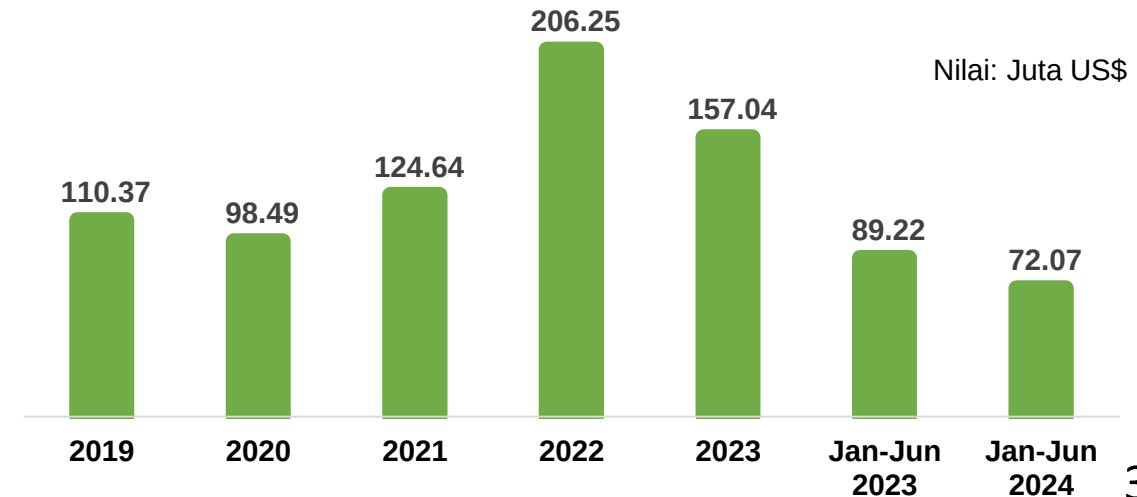
Rumput Laut RAW

Nilai: Juta US\$



Rumput Laut OLAHAN

Nilai: Juta US\$



2023

Nilai Ekspor Rumput Laut Indonesia
mencapai **US\$ 441,84 Juta**

+14.58%

Trend 2019 -2023

-27.24%

Perubahan 2023/2022

TOP 20 NEGARA TUJUAN EKSPOR RUMPUT LAUT INDONESIA

Nilai : US\$

NO	NEGARA	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%)	Share (%)	JAN-JUN		Perub. % 24/23
							2019-2023	2023	2023	2024	
TOTAL		328,566,906.57	281,621,416.43	348,493,003.22	607,258,252.42	441,841,144.46	14.58	100	251,847,747.47	163,621,886.20	-35.03
1	REP.RAKYAT CINA	227,429,573.76	192,709,437.14	238,141,981.79	424,918,840.06	318,412,290.80	15.76	72.06	185,096,750.97	108,669,403.34	-41.29
2	AMERIKA SERIKAT	17,406,187.49	10,343,285.19	13,746,532.93	21,178,552.85	13,905,347.03	2.71	3.15	7,147,175.43	4,829,044.11	-32.43
3	JEPANG	9,673,104.09	8,180,884.84	7,509,487.12	12,420,570.92	12,038,041.33	8.93	2.72	6,533,776.36	5,254,801.56	-19.57
4	INGGRIS	7,098,725.10	6,775,850.99	9,828,888.60	10,878,561.24	10,111,365.02	12.53	2.29	5,679,610.88	4,573,817.53	-19.47
5	KANADA	747,860.55	1,131,260.94	5,227,203.32	6,789,679.94	8,750,740.85	95.65	1.98	4,404,069.16	2,591,029.48	-41.17
6	CHILI	9,922,195.41	6,078,100.95	5,864,442.20	10,336,901.78	8,748,206.45	2.83	1.98	5,084,593.15	3,119,670.77	-38.64
7	VIETNAM	3,574,403.07	4,636,644.78	6,874,135.64	6,090,492.22	8,038,597.13	20.85	1.82	3,683,139.64	2,412,130.23	-34.51
8	BELANDA	4,711,819.13	6,199,287.26	7,491,142.54	7,100,999.61	6,819,207.09	9.15	1.54	5,029,423.91	1,748,031.83	-65.24
9	JERMAN	1,902,762.37	2,212,737.83	6,819,170.53	9,326,252.13	6,683,414.39	48.46	1.51	3,841,771.00	4,948,344.73	28.80
10	FEDERASI RUSIA	2,020,825.59	3,942,061.94	5,411,026.96	13,989,058.77	6,166,345.86	41.88	1.40	4,358,545.27	1,609,699.17	-63.07
11	KOREA SELATAN	10,270,879.92	9,815,454.15	5,694,869.40	16,087,928.49	6,035,626.04	-5.53	1.37	3,559,964.50	3,725,487.41	4.65
12	AUSTRALIA	2,513,423.74	3,720,107.23	3,354,328.70	4,839,037.11	4,181,974.53	13.67	0.95	1,931,652.36	2,114,426.37	9.46
13	PILIPINA	3,502,857.23	3,104,238.80	6,431,391.68	8,907,465.61	3,704,998.61	12.37	0.84	2,015,079.98	2,841,818.33	41.03
14	ITALIA	2,361,938.35	2,167,977.81	3,987,220.59	4,257,989.60	3,704,242.18	17.06	0.84	1,779,605.40	2,402,870.53	35.02
15	MALAYSIA	2,599,262.23	2,786,095.65	2,462,380.75	3,681,813.95	3,500,313.53	9.13	0.79	1,810,324.13	1,320,658.78	-27.05
16	PERANCIS	6,528,452.72	5,075,614.87	4,085,674.78	14,592,984.91	3,386,997.56	-2.53	0.77	2,472,943.50	915,553.61	-62.98
17	INDIA	1,302,463.14	1,723,874.13	1,574,856.29	2,511,049.69	2,919,602.17	22.02	0.66	1,113,297.30	1,423,842.37	27.89
18	SPANYOL	3,934,801.27	2,059,542.63	3,488,979.55	10,995,922.74	2,250,792.85	5.74	0.51	561,848.57	4,663,451.70	730.02
19	THAILAND	1,175,208.36	1,443,555.82	2,351,457.94	2,364,441.30	1,999,922.40	16.84	0.45	1,064,736.53	1,278,409.72	20.07
20	POLANDIA	92,290.00	699,973.85	1,193,702.86	1,791,992.24	1,599,621.43	94.36	0.36	712,917.13	685,104.32	-3.90

Negara utama tujuan ekspor rumput laut tahun 2020 adalah **RRT (72.06%)**, **Amerika Serikat (3,15%)**, dan **Jepang (2,72%)**

Spanyol, Filipina, dan Italia merupakan negara yang selama 2021/2020 memiliki kenaikan cukup signifikan.

Sumber : BPS
diolah Dit. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kemendag

PROVINSI PENGEKSPOR RUMPUT LAUT INDONESIA

Nilai : Juta US\$

NO	PROVINSI	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%) 2019-2023	Share (%) 2023	JAN-JUN		Perub. % 24/23
									2023	2024	
TOTAL		328.57	281.62	348.49	607.26	441.84	14.58	100	251.85	163.62	-35.03
1	SULAWESI SELATAN	170.70	166.49	207.99	394.39	282.31	20.55	63.89	165.55	102.04	-38.36
2	JAWA TIMUR	79.25	77.20	96.06	141.45	93.87	9.90	21.25	52.45	36.10	-31.17
3	KALIMANTAN UTARA	53.09	18.54	15.68	29.15	32.95	-4.89	7.46	17.79	10.36	-41.74
4	JAWA BARAT	9.91	7.74	11.64	14.75	7.14	-0.12	1.62	3.15	3.81	20.75
5	JAWA TENGAH	0.26	0.15	0.45	0.28	3.94	83.45	0.89	0.14	4.61	3187.64
6	SULAWESI TENGGARA	1.08	1.59	1.19	0.65	3.55	15.94	0.80	2.37	0.82	-65.38
7	NUSA TENGGARA TIMUR	3.49	1.16	4.05	10.09	3.45	23.84	0.78	2.17	0.74	-66.12
8	KALIMANTAN TIMUR	0.21	0.41	0.59	1.39	3.44	98.50	0.78	1.83	1.41	-22.69
9	MALUKU	2.10	2.16	2.41	4.21	2.81	13.25	0.64	2.20	0.55	-75.08
10	NUSA TENGGARA BARAT	0.62	0.70	0.82	1.42	2.25	38.66	0.51	1.25	0.44	-64.83
11	KEPULAUAN RIAU	0.32	0.29	1.62	2.57	1.56	71.53	0.35	0.60	0.56	-7.72
12	BANTEN	2.05	1.92	2.49	2.11	1.53	-4.81	0.35	0.65	0.52	-18.95
13	SULAWESI TENGAH	1.16	0.64	1.55	0.80	1.38	5.72	0.31	0.58	0.56	-3.15
14	DKI JAKARTA	2.20	1.49	1.13	2.04	0.59	-20.81	0.13	0.52	0.42	-19.70
15	LAMPUNG	0.21	0.27	0.42	0.55	0.49	26.76	0.11	0.31	0.10	-67.85
16	SUMATERA UTARA	1.33	0.53	0.07	0.54	0.45	-19.36	0.10	0.24	0.32	31.60
17	MALUKU UTARA	0.08	-	-	0.58	0.08	-	0.02	-	-	-
18	BALI	0.04	0.00	0.22	0.14	0.06	52.40	0.01	0.04	0.19	369.21
19	KALIMANTAN SELATAN	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	0.16	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-100.00
21	D.I. YOGYAKARTA	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
22	JAMBI	-	-	0.02	0.03	-	-	-	-	-	-
23	NANGROE ACEH DARUS	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
24	SULAWESI UTARA	0.30	0.33	0.08	0.12	-	-	-	-	0.07	-

Provinsi Kalimantan Utara menempati **peringkat ke-3** provinsi pengekspor rumput laut Indonesia dengan kontribusi sebesar 7,46% terhadap total ekspor rumput laut Indonesia tahun 2023, namun *trend* ekspornya pada periode 2019 – 2023 **menurun** sebesar **4.89%**

Sumber : BPS diolah Dit. Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan, Kemendag

NILAI EKSPOR RUMPUT LAUT KALTARA RAW DAN OLAHAN

RAW											Nilai : US\$
HS	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%) 2019-2023	Share (%) 2023	JAN-JUN		Perub. % 24/23
									2023	2024	
TOTAL		53,090,353.62	18,543,898.18	15,203,991.29	28,659,189.42	32,844,981.07	-5.12	100	17,738,761.30	10,286,751.77	-42.01
12122111	Carrageenan, alkali treated carrageenan chips	172,769.05	67,894.25	72,959.45	204,411.16	471,927.45	36.51	1.44	275,694.20	67,975.07	-75.34
12122112	Carrageenan, powder, semi-refined	52,275,347.47	18,430,126.93	13,782,104.44	27,195,551.28	31,982,022.32	-5.76	97.37	17,251,212.10	10,137,451.10	-41.24
12122113	Eucheuma cottonii, dried but not ground	479,337.10	45,877.00	1,348,927.40	1,245,562.14	391,031.30	33.56	1.19	211,855.00	81,325.60	-61.61
12122119	Eucheuma spinosum, dried but not ground	-	-	-	13,664.84	-	-	0.00	-	-	-
12122919	Gracilaria spp, dried but not ground	162,900.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-

OLAHAN											
HS	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%) 2019-2023	Share (%) 2023	JAN-JUN		Perub. % 24/23
									2023	2024	
TOTAL		-	-	472,855.70	491,750.00	104,092.34	-	0	51,237.53	77,435.12	51.13
13023911	Mucilages and thickeners, whether or not mo	-	-	-	491,750.00	-	-	0.00	-	-	-
13023913	Seaweeds and other algae other than eucheu	-	-	469,662.00	-	-	-	0.00	-	-	-
13023990	Seaweeds and other algae, fresh, chilled or d	-	-	3,193.70	-	104,092.34	-	100.00	51,237.53	77,435.12	51.13

Sumber : BPS diolah Dit. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kemendag

Ekspor Tertinggi terdapat pada Produk **Keraginan Bubuk/semi-refined (Kode HS 1212.21.12)** dengan *share* pada tahun 2023 mencapai **97.06 %** dari seluruh ekspor produk rumput laut asal Kalimantan Utara

NEGARA TUJUAN EKSPOR RUMPUT LAUT KALTARA RAW DAN OLAHAN

RAW										Nilai : US\$
URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%) 2019-2023	Share (%) 2023	JAN-JUN		Perub. % 24/23
								2023	2024	
	53,090,353.62	18,543,898.18	15,203,991.29	28,659,189.42	32,844,981.07	-5.12	100	17,738,761.30	10,286,751.77	-42.01
REP.RAKYAT CINA	49,927,431.9	15,421,888.2	12,644,814.2	25,603,540.8	31,736,585.8	-3.91	96.63	16,949,845	9,326,074	-44.98
KOREA SELATAN	882,528.5	2,897,740.9	1,504,861.1	2,466,428.6	506,226.4	-11.95106	1.54	380,465	867,260	127.95
VIETNAM	-	-	-	181,150.0	214,561.4	-	0.65	193,657	-	-
CHILI	868,924.2	175,019.1	600,250.0	154,000.0	205,000.0	-26.04	0.62	115,000	93,279	-18.89
DENMARK	1,393,759.1	-	-	-	75,600.0	-	0.23	75,600	-	-
PILIPINA	-	-	265,733.9	216,725.0	56,281.5	-	0.17	4	1	-79.07
TUNISIA	-	-	141,515.0	37,345.0	26,536.0	-	0.08	-	-	#DIV/0!
SPANYOL	-	-	46,817.1	-	24,190.0	-	0.07	24,190	1	-100.00
INDIA	-	-	-	-	-	-	0.00	-	123	-
PERANCIS	-	-	-	-	-	-	0.00	-	14	-
TAIWAN	17,710.0	49,250.0	-	-	-	-	0.00	-	-	#DIV/0!

OLAHAN										
URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%) 2019-2023	Share (%) 2023	JAN-JUN		Perub. % 24/23
								2023	2024	
	-	-	472,855.70	491,750.00	104,092.34	-	100	51,237.53	77,435.12	51.13
MALAYSIA	-	-	3,193.70	-	104,092.34	-	100.00	51237.53	77435.12	51.13
PILIPINA	-	-	469,662.00	-	-	-	0.00	-	-	-
INGGRIS	-	-	-	491,750.00	-	-	0.00	-	-	-

Pada tahun 2023 Ekspor produk **rumput laut mentah** asal Kalimantan Utara tertinggi ke Negara **RRT (95.75%)**

Terdapat peningkatan signifikan ekspor **rumput laut mentah** asal Kalimantan Utara ke **Korea Selatan**

Sumber : BPS diolah Dit. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kemendag

NEGARA IMPORTIR RUMPUT LAUT RAW

		Nilai : Ribu US\$						
No	Negara	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%)	Share (%)
	Total	1.166.527	1.090.341	1.223.713	1.568.737	1.502.144	5	100,00
1	China	341.586	293.209	389.907	647.805	502.444	49	33,45
2	Japan	241.136	220.261	192.997	210.414	239.178	19	15,92
3	United States of America	95.490	93.138	105.303	125.197	109.492	13	7,29
4	Thailand	57.895	54.677	45.041	49.197	68.294	4	4,55
5	France	34.978	34.660	31.644	53.238	60.432	30	4,02
6	Taipei, Chinese	48.066	47.479	49.582	58.775	57.146	(44)	3,80
7	Russian Federation	28.649	36.318	51.025	37.203	51.113	5	3,40
8	Australia	28.203	28.509	27.398	32.336	28.288	128	1,88
9	Spain	19.612	17.799	22.200	27.553	25.886	143	1,72
10	Viet Nam	10.700	11.889	15.775	14.962	24.419	(18)	1,63
11	Norway	7.673	7.981	9.262	12.746	23.942	28	1,59
12	United Kingdom	21.183	18.290	20.364	23.899	23.447	15	1,56
13	Canada	10.183	10.411	16.862	17.399	23.167	57	1,54
14	Korea, Republic of	28.531	24.399	16.648	28.949	20.827	30	1,39
15	Indonesia	3.272	6.071	6.875	14.400	19.929	18	1,33
16	Denmark	13.142	10.582	9.811	12.349	19.364	53	1,29
17	Brazil	13.079	11.557	15.510	12.860	19.027	22	1,27
18	Chile	17.330	15.002	14.326	14.739	15.421	11	1,03
19	Germany	11.787	11.725	15.864	16.367	14.417	16	0,96
20	Ireland	11.242	11.814	13.283	13.470	12.945	(6)	0,86

RRT (33,45%) dan Jepang (15,92%) masih menjadi negara pengimpor utama rumput laut RAW

NEGARA IMPORTIR RUMPUT LAUT OLAHAN

Nilai : Ribu US\$							
No	Negara	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%) Share (%)
	Total	1.432.471	1.407.425	1.578.277	2.143.136	1.884.261	6 100,00
1	United States of Americ	149.227	126.191	151.231	227.792	196.998	19 10,45
2	Germany	91.899	100.549	126.112	161.817	134.224	33 7,12
3	China	99.765	81.117	102.342	154.060	113.841	3 6,04
4	Spain	88.619	84.780	88.716	144.419	107.794	9 5,72
5	Russian Federation	73.950	71.389	78.723	134.897	97.702	2 5,19
6	Japan	75.373	71.274	68.478	85.645	90.589	6 4,81
7	Denmark	47.395	48.387	46.318	86.420	63.794	(15) 3,39
8	United Kingdom	52.969	78.221	69.795	77.870	62.646	(1) 3,32
9	Netherlands	26.678	27.024	35.052	46.776	62.054	4 3,29
10	France	41.897	39.950	48.829	61.418	59.593	(4) 3,16
11	Thailand	48.078	45.795	58.050	75.551	59.353	11 3,15
12	Mexico	44.448	43.530	41.228	43.477	53.387	12 2,83
13	Korea, Republic of	20.834	23.425	26.182	60.277	53.035	3 2,81
14	Poland	35.607	36.123	38.425	42.283	39.962	15 2,12
15	Italy	31.052	25.243	33.962	41.258	37.347	6 1,98
16	Brazil	32.293	33.991	31.344	41.165	36.584	18 1,94
17	Chile	10.055	13.294	21.285	30.162	32.718	(7) 1,74
18	Philippines	28.264	20.518	29.832	42.107	31.696	43 1,68
19	Belgium	38.653	33.708	37.346	34.681	31.298	12 1,66
20	India	18.548	22.730	24.447	23.768	30.513	19 1,62

USA (10,45%) menjadi negara pengimpor utama rumput laut Olahan

UPAYA PENGAMANAN AKSES PASAR EKSPOR INDONESIA

DPP, Daglu



Pembelaan Teknis, Politis/Diplomatis dan Litigasi

Pembelaan dilakukan secara teknis, faktual dan legal kepada Otoritas Investigasi, pendekatan diplomatik tingkat tinggi, gugatan banding oleh pelaku usaha pada pengadilan nasional negara penuduh, dan melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO.

Selain itu Kemendag juga berkoordinasi dengan perwakilan perdagangan di negara akreditasi (Atase Perdagangan, ITPC, dsb) untuk meminta klarifikasi dari K/L terkait di negara mitra dagang mengenai permasalahan hambatan perdagangan yang dikenakan kepada eksportir dan mencari solusi-nya.



Penggunaan Scientific Evidence

Melalui pengumpulan bukti-bukti ilmiah dari berbagai sumber (pakar, akademisi, law firms) guna mendukung argumen dalam pembelaan Pemerintah.



Penggalangan Stakeholders di Negara Penuduh

Bekerjasama dengan importir, asosiasi industri pengguna, distributor di negara penuduh untuk secara simultan menyuarkan keberatan dan penolakan terhadap tuduhan yang dikenakan.



Koordinasi dengan stakeholders di dalam negeri

Berkoordinasi dengan KKP (termasuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan/BKIPM), serta eksportir yang mengalami hambatan Non Tarif di negara tujuan ekspor.

PENTINGNYA SKA

Ditfas, Daglu

Dokumen masuk komoditi
ekspor Indonesia ke negara
tujuan ekspor (mencegah
Free Rider)

Pengurangan atau
penghapusan tarif/
tarif preferensi

Persyaratan
pencairan L/C



Menetapkan Negara Asal
Barang (*Country of Origin*)
suatu barang ekspor

Pelaksanaan pengamanan
perdagangan (*trade
remedies*)

Data statistik dan
Penentuan strategi dan
Kebijakan nasional

PERJANJIAN YANG TELAH TERIMPLEMENTASI

1. **Indonesia-Japan EPA**
Signed: 20 August 2007, **Implemented:** 1 July 2008
[General Review IJEPA]
Concluded: 21 June 2019
Protocol to Amend IJEPA
Status: Concluded
2. **Indonesia-Pakistan PTA**
Signed: 3 February 2012, **Implemented:** 1 September 2013
[Protocol to Amend IPPTA]
Signed: 27 January 2018 **Implemented:** 1 March 2019
3. **Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products**
MoU Signed: 12 December 2017, **Implemented:** : 21 February 2019
4. **Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)**
Signed: 14 December 2017, **Implemented:** 10 August 2019
5. **Indonesia-Australia CEPA**
Signed: 4 March 2019, **Implemented:** 5 July 2020,
6. **Indonesia-EFTA CEPA**
Signed: 16 December 2018, **Implemented:** 1 November 2021
7. **Indonesia-Mozambique PTA**
Signed: 27 August 2019, **Implemented:** 6 June 2022
8. **ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)**
Signed: 27 February 2009, **Implemented:** 10 January 2012
1st Protocol to Amend AANZFTA
Signed: 26 August 2014 **Implemented:** 1 March 2019
9. **ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)**
Signed: October 2003, **Implemented:** 1 January 2010
10. **ASEAN Agreement on Medical Device Directive**
Signed: 21 November 2014, **Implemented:** 12 November 2018
11. **ASEAN-Korea FTA (AKFTA)**
Signed: 22 November 2015, **Implemented:** 12 November 2018 (3rd Protocol to Amend TIG)
12. **ASEAN-China FTA (ACFTA)**
Signed: 12 November 2017, **Implemented:** 1 August 2019 (Upgrading Protocol ACFTA)
13. **ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement**
Signed: 12 November 2017, **Implemented:** 4 July 2020
14. **ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)**
Signed: 11 November 2018, **Implemented:** 13 Mei 2022 (10th Packages of Commitments)
15. **ASEAN Agreement on E-Commerce**
Signed: 22 January 2019, **Implemented:** 2 December 2021
16. **ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)**
Signed: 26 February 2009, **Implemented:** 17 Mei 2010
First Protocol to Amend ATIGA to allow ASEAN Wide Self Certification (AWSC) Scheme
Signed: 22 January 2019, **Implemented:** 20 September 2020
17. **ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)**
Signed: 1 December 2008, **Implemented:** 1 March 2018
First Protocol to Amend AJCEP
Signed: 2 March 2019, **Implemented:** 1 February 2022
18. **ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)**
Signed: 23 April 2019, **Ratified:** 8 Feb 2022, (4th Protocol to Amend)
19. **ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)**
Signed: 7 Oktober 2020. **Ratified:** 16 January 2023
20. **ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)**
Signed: 20 December 2019. **Implemented:** 01 July 2022
21. **Trade Facilitation Agreement (TFA)**
[concluded 7 December 2013, Implemented: 22 November 2017]
22. **Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)**
Signed: 15 November 2020, **Implemented:** 1 January 2023
23. **Indonesia-Korea CEPA**
Signed: 18 December 2020, **Implemented:** 1 January 2023
24. **Preferential Trade Arrangement D8 (PTA-D8)**
Signed 13 May 2006, **Ratified** 9 September 2011, **Target of implementation:** 2023
25. **Trade Preferential System OIC (TPS-OIC)**
Signed 1 January 2014, **ratification process**
26. **Indonesia-United Arab Emirates CEPA**
Signed: 1 July 2022, **Implemented:** 1 September 2023
27. **Agreement on Fisheries Subsidies-Ministerial Decision**
Signed: 17 June 2022
28. **Work Programme on Electronic Commerce – Ministerial Decision**
29. **Ministerial Declaration on the WTO Response to the COVID-19 Pandemic and Preparedness for Future Pandemics dan Ministerial Decision on the TRIPS Agreement**
30. **Ministerial Decision on World Food Programme Food Purchases Exemption from Export Prohibitions or Restrictions**
31. **Ministerial Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity**
32. **WTO Outcome Document**
32. **ASEAN Agreement on MNP**
Signed: 19 November 2012, **EIF:** 14 June 2016
Protocol to Amend ASEAN MNP Agreement
Signed: 2 November 2022
34. **Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)**
Signed: 21 November 2022, **Current Status:** ratification process
35. **International Coffee Agreement (ICA) 2022**
Signed: 8 Maret 2023, **Current Status:** ratification process
36. **Indonesia-Iran PTA**
Signed: 23 May 2023, **Current Status:** ratification process
37. **Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement**
Signed: 8 Juni 2023, **Current Status:** ratification process
38. **2nd Protocol to Amend AANZFTA**
Signed: 21 August 2023

PROGRAM KEMENTERIAN PERDAGANGAN



Informasi Ekspor dapat diakses melalui
www.exim.kemendag.go.id



(<http://inaexport.id>)

Layanan online mempromosikan produk Eksportir Indonesia dan sebagai sumber informasi potensi pasar luar negeri dan telah terintegrasi dengan perwakilan perdagangan di luar negeri (Atdag/ITPC)



Pameran, Misi Dagang, dan Trade Expo Indonesia (TEI)



Digitalisasi Perizinan Ekspor
Yang telah terintegrasi satu pintu melalui
INSW



1. **Designer Dispatch Service (DDS)** : program pendampingan untuk menghasilkan produk-produk berbasis desain sesuai tren global saat ini
2. **Pendidikan dan Pelatihan Ekspor (PPIE)** bagi calon eksportir sehingga dapat mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dirinya untuk melakukan kegiatan ekspor



**Percepatan penyelesaian
perundingan perdagangan
Internasional**

KONEKTIVITAS DENGAN PERWAKILAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI



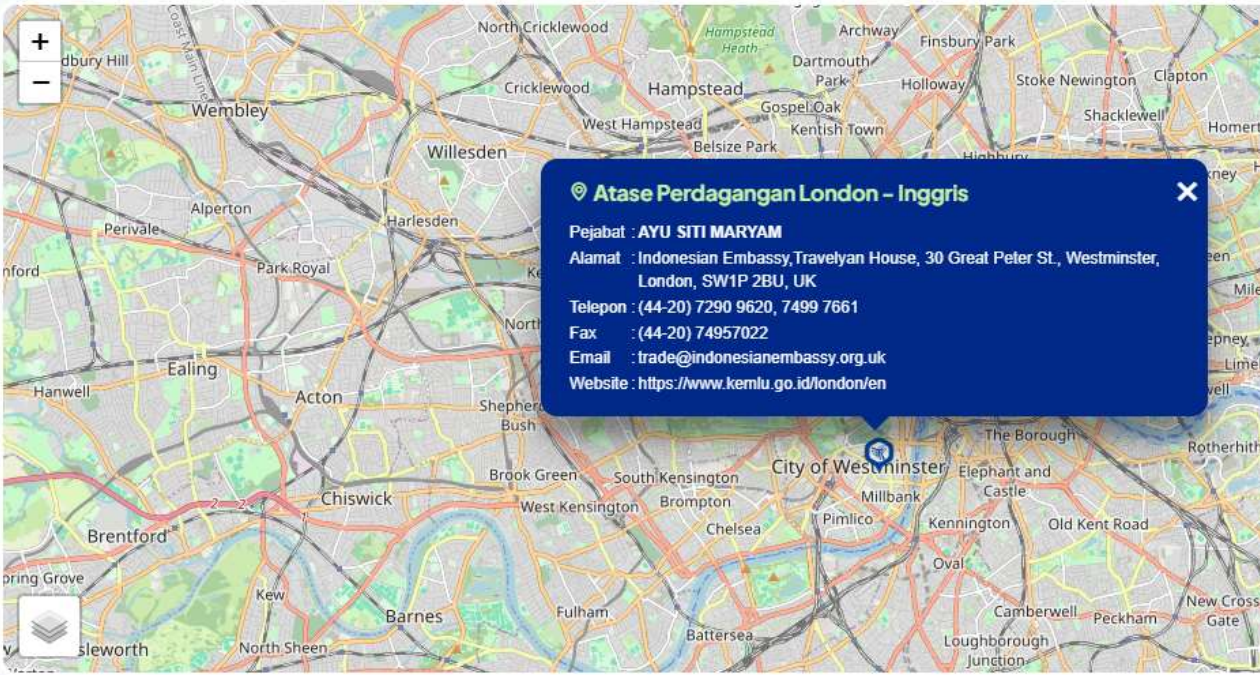
 Formasi Mekanisme Ekspor & Import

[Beranda](#) [Atdag / ITPC](#) [Bantuan](#) [Bahasa Indonesia](#) [Masuk](#)

Informasi Mekanisme Ekspor Import (EXIM)

[Saya Ingin EKSPOR](#) [Saya Ingin IMPOR](#)

Sistem ini membantu anda dalam menentukan negara tujuan ekspor berdasarkan skema Free Trade Agreement (FTA) / Preferential Trade Agreement (PTA) / Comprehensive Economic Partnership (CEPA) yang lebih mudah dan menguntungkan.

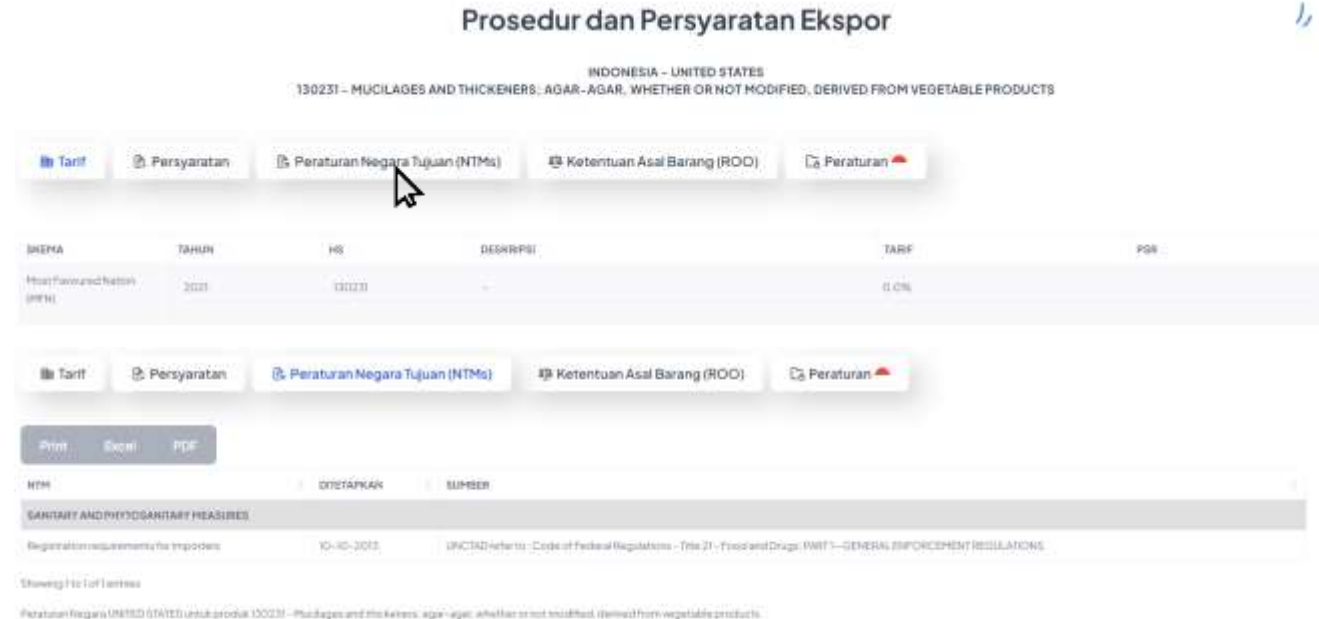


EXIM KEMENDAG



Simulasi

<https://exim.kemendag.go.id/>
<https://findrulesoforigin.org/>
<https://insw.go.id/intr>



RESI GUDANG



RESI GUDANG KALTARA

GUDANG SRG MENDAPAT PERSETUJUAN BAPPEBTI

- Gudang Cold Storage PT. Tarakan Fiserindo Sipatuo - Komoditas ikan

Jalan Pangeran Aji Iskandar Gang Kurau RT 15 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan

- Gudang Cold Storage A PT. Sabindo Raya Gemilang - Komoditas ikan

Jalan Gajah Mada Kompleks TPI RT. 15 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan

- Gudang Cold Storage B PT. Sabindo Raya Gemilang - Komoditas Ikan

Jalan Gajah Mada Kompleks TPI RT. 15 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan

- Gudang PT Bunga Laut Samudra Jaya - Komoditas Rumput Laut

Jalan Binalatung Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan

PENGELOLA SRG

- PT. Tarakan Fiserindo Sipatuo
- PT. Sabindo Raya Gemilang
- PT Bunga Laut Samudra Jaya

Trade Expo Indonesia ke-39 Tahun 2024

DITJEN PEN



KATEGORI PRODUK

Food, Beverage,
Agriculture
Products

Manufactured
Products

Home Living,
Fashion,
Services

PROGRAM

*B2B Business Matching,
Trade Mission,
International Seminar,
Business Counseling,
MoU/Lol/Contract
Signing, Buyers Nights,
Journalist Award*

CAPAIAN TEI 2023

- ✓ **1.200+** Peserta
- ✓ **38.900** pengunjung dari **115** negara
- ✓ Total Transaksi

USD 30,5 Miliar

Rincian Transaksi:

<i>Business Matching</i>	<i>Signing MoU</i>	<i>Transaksi Harian</i>
USD 20 juta	USD 24,37 Miliar	USD 6,11 Miliar

KONTAK KAMI



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Layanan UPTP I

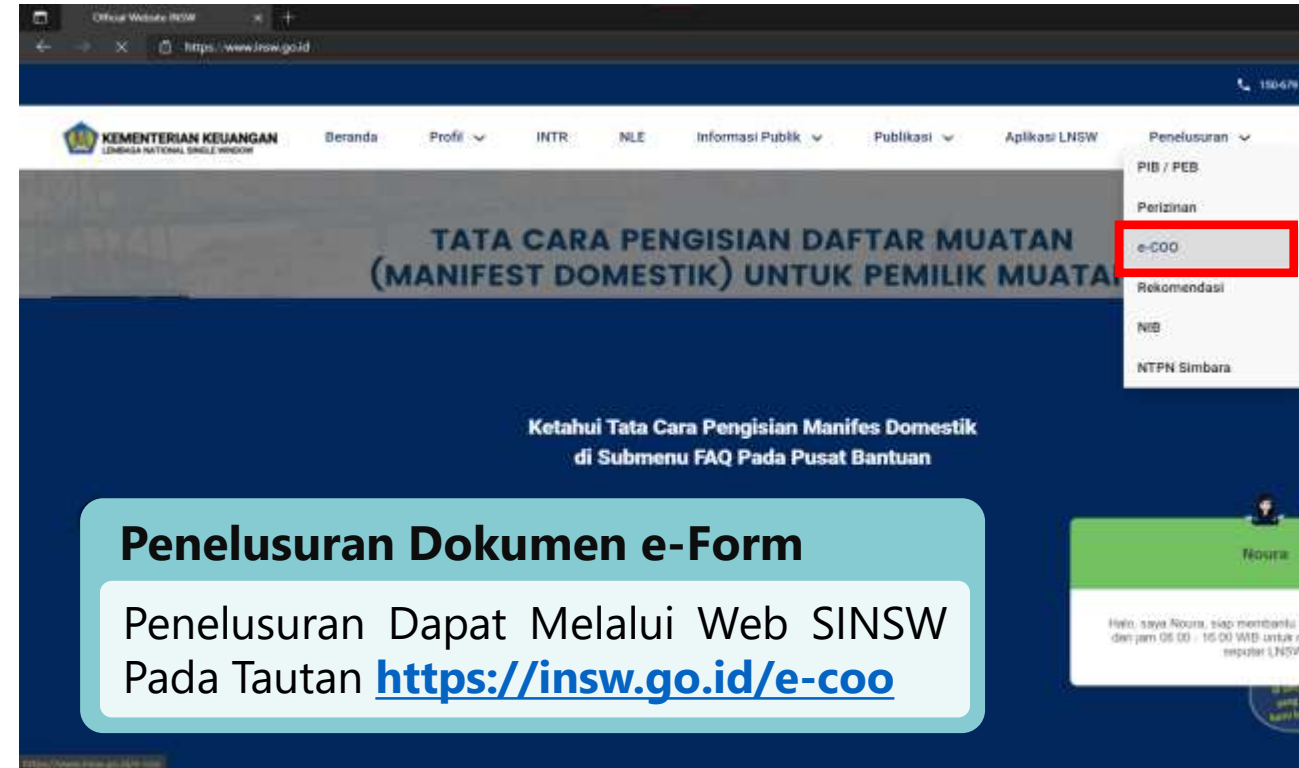
Bidang Perdagangan Luar Negeri

 **Tatap Muka Virtual: Senin--Jumat**
pukul 10.00--15.00 WIB

- Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan**
Meeting ID: 592-008-4499
Passcode: dektanhut
- Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan**
Meeting ID: 610-066-5919
Passcode: dekindam
- Direktorat Impor**
Meeting ID: 799-863-7042
Passcode: ditimpor

*saat konsultasi wajib mencantumkan nama dan identitas perusahaan.

www.kemendag.go.id @Kemendag Kementerian Perdagangan #AyoDagang



Official Website RNSW
https://www.insw.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN
LAINESIA NATCHEL SINGLE WINDOW

Beranda Profil INTR NLE Informasi Publik Publikasi Aplikasi LNSW Penelusuran

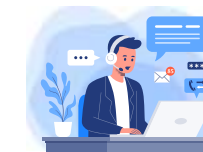
PIB / PEB
Perizinan
e-COO
Rekomendasi
NIB
NTPN Simbara

TATA CARA PENGISIAN DAFTAR MUATAN (MANIFEST DOMESTIK) UNTUK PEMILIK MUATAN

Ketahui Tata Cara Pengisian Manifes Domestik di Submenu FAQ Pada Pusat Bantuan

Penelusuran Dokumen e-Form

Penelusuran Dapat Melalui Web SINSW Pada Tautan <https://insw.go.id/e-coo>



Contact Center LNSW
150-679

Contact Center SKA Kemendag
1 500-067

Website
ska.kemendag.go.id
(021) 3858171 Ext. 1161
ska@kemendag.go.id



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan





Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

MATERI KEGIATAN

***“Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
Komoditi Rumput Laut”***



Oleh : Darmansyah, S.Pi

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



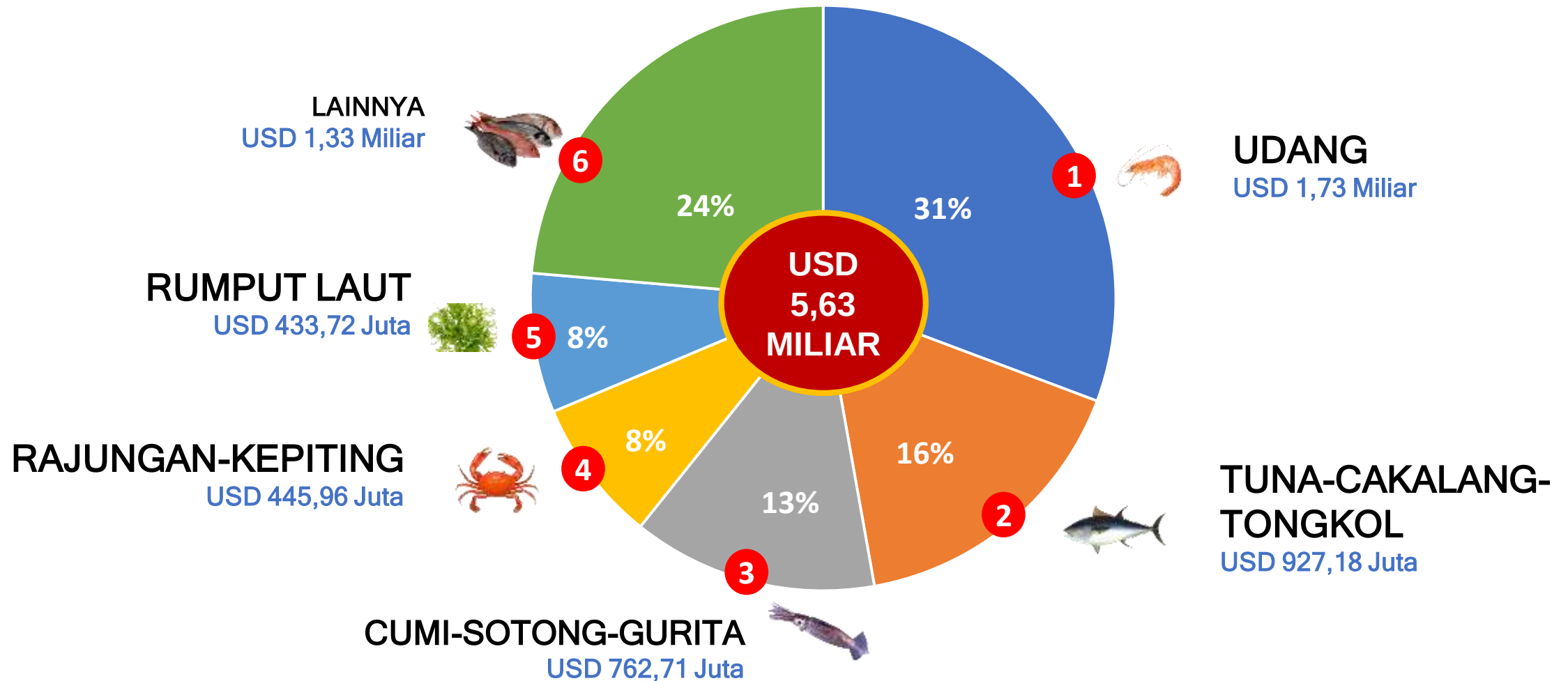


OUTLINE

1. Pendahuluan
2. Transformasi Kelembagaan BKIPM
3. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

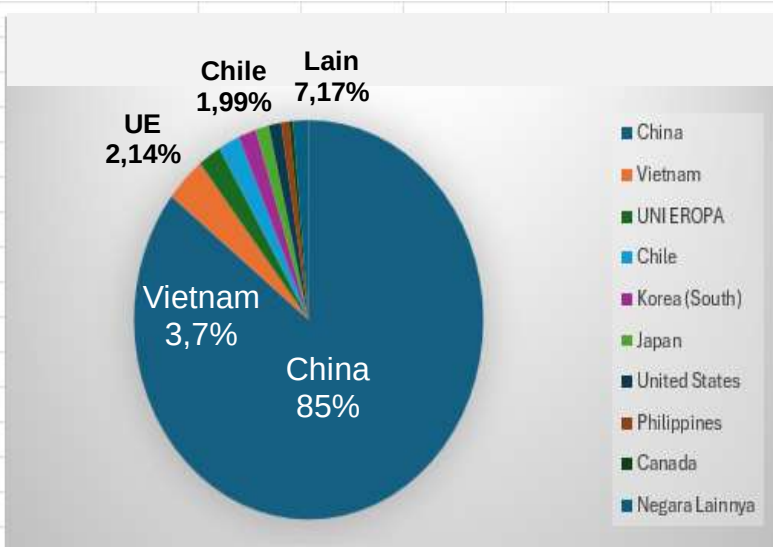
1. PENDAHULUAN

Komoditas Utama Ekspor Produk Perikanan Indonesia Tahun 2023



Ekspor Rumput Laut Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan dan Jenis Produk (2023)

NO	NEGARA	VOLUME (Kg)	%
1	China	229.750.883,70	85,62%
2	Vietnam	9.929.575,76	3,70%
3	UNI EROPA	5.744.625,06	2,14%
4	Chile	5.329.019,40	1,99%
5	Korea (South)	4.414.198,20	1,65%
6	Japan	3.275.497,56	1,22%
7	United States	3.118.282,74	1,16%
8	Philippines	1.950.187,05	0,73%
9	Canada	977.555,90	0,36%
10	United Kingdom	679.031,35	0,25%
11	India	532.041,80	0,20%
12	Russian Federation	503.003,60	0,19%
13	Australia	429.066,70	0,16%
14	Hong Kong	378.066,00	0,14%
15	United Kingdom (GB)	325.009,50	0,12%
16	Thailand	179.805,50	0,07%
17	Malaysia	175.018,60	0,07%
18	Mexico	153.000,90	0,06%
19	Taiwan	126.752,60	0,05%
20	Negara Lain	365.012,70	0,14%
TOTAL		268.335.634,62	100,00%



No	Jenis	Volume (kg)	%
1	Beku	61.585	0,022951
2	Cairan	136.007	0,050685
3	Kering	247.717.806	92
4	Lainnya	6.978.129	2,600522
5	Segar/Basah	170.554	0,06356
6	Tepung	13.271.555	4,945879
Total		268.335.635	100

2. TRANSFORMASI KELEMBAGAAN BKIPM



PERPRES NO. 45 TAHUN 2023
tentang
**BADAN KARANTINA
INDONESIA**



**BADAN KARANTINA
INDONESIA**



PERPRES NO. 38 TAHUN 2023
TENTANG
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN**



**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BPPMHKP) KKP**



TUGAS DAN FUNGSI BPPMHKP

(Perpres 38/2023)



TUGAS

Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

FUNGSI



Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi BPPMHKP Pusat :

- Sekretariat BKIPM
- Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer
- Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen
- Pusat Manajemen Mutu

Usulan Satker UPT BPPMHKP :

- 37 UPT Pelayanan/Operasional
- 1 UPT laboratorium acuan (BUSPM)

SOTK BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN (BPPMHKP) (PERMENKP No. 5 Tahun 2024)

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Sekretariat Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

Pusat Manajemen Mutu

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Produksi Primer

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Pasca Panen

UPT

TENTANG BPPMHKP

1

Berdasarkan **Pepres Nomor 38 tahun 2023** tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit kerja eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

2

BPPMHKP menyelenggarakan tugas dan fungsi **pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan (Quality Assurance)** serta sebagai **Otoritas Kompeten** sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

3

Dengan motto **“Bring Safety Through Quality”** BPPMHKP berkomitmen untuk terus menjaga mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan Indonesia



LAYANAN SERTIFIKASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil keautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi, inspeksi dan surveilan. Sertifikasi yang dilaksanakan terbagi menjadi:

Sertifikasi mutu produksi primer

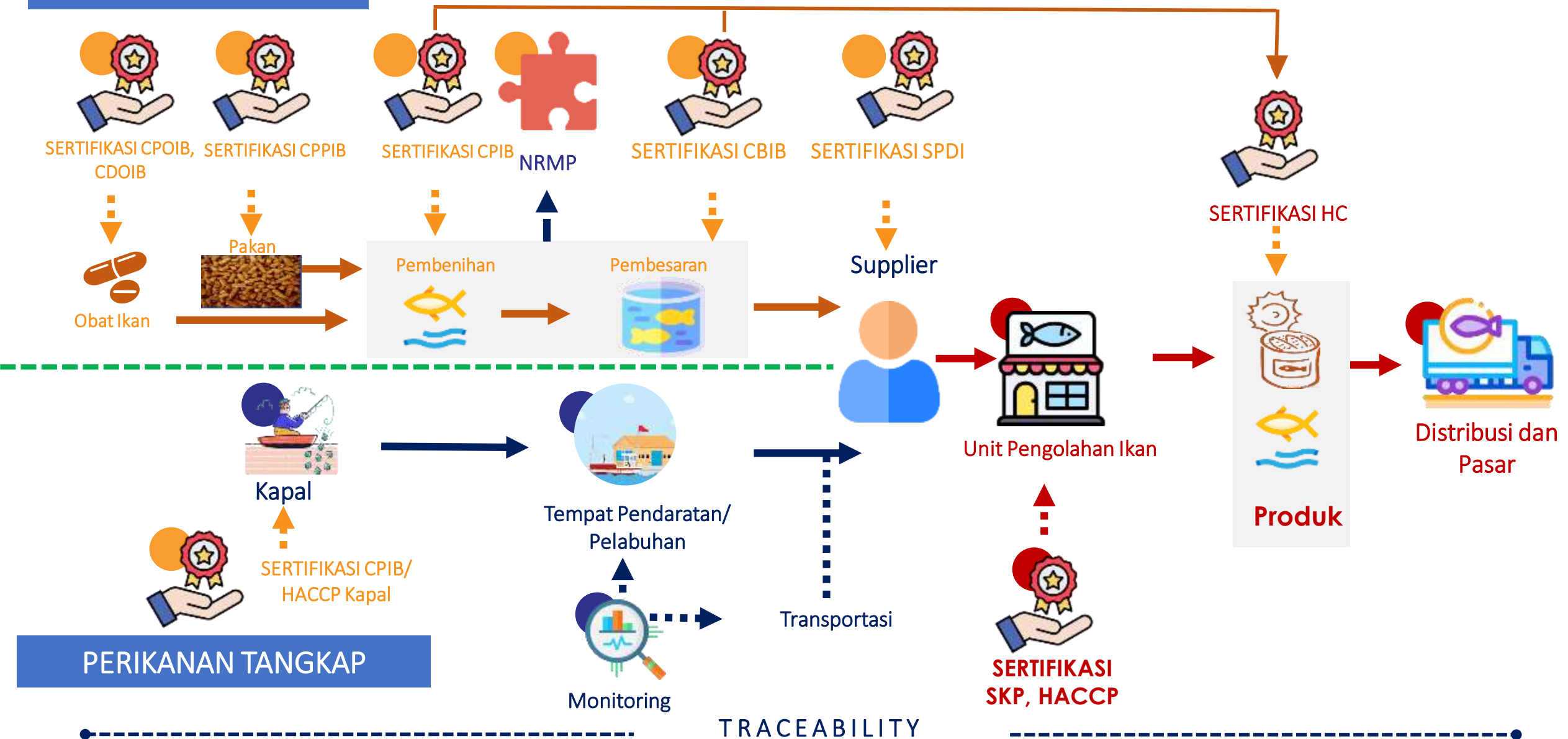


Sertifikasi mutu pasca panen



PERIKANAN BUDIDAYA

III. SISTEM MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN HULU-HILIR



"No matter how good a company organizes one element of a chain, if any other part of the chain doesn't perform, the whole chain is contaminated"

Proses Bisnis Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Tujuan EKSPOR

PRE-BORDER

BORDER

PENJAMINAN MUTU HULU HILIR

KKP
sebagai Otoritas kompeten Komoditi
Kelautan dan Perikanan

BARANTIN
sebagai Otoritas Kompeten
Pengendalian/Pengawasan Perkarantinaan
Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Border

LNSW
sebagai Otoritas Kompeten
Integrasi Sistem dan Informasi
Nasional

Perikanan Tangkap

- CPIB/HACCP Kapal

Pasca Panen

Supplier :

- SPDI

Unit Pengolahan Ikan :

- SKP
- HACCP

Perikanan Budidaya

- CPIB benih;
- CBIB pembesaran;
- CPPIB pakan;
- CPOIB;
- CDOIB

Ikan hidup konsumsi, non konsumsi/non pangan

Permohonan

Evaluasi
Administrasi dan teknis



SKIHP

Dokumen
lain



BARANTIN

SLA bersama
INSW, Barantin & KKP



NPE-PE



DJBC

Ekspor
Komoditi
Perikanan

Notifikasi/Aliran Data Aktivitas Ekspor Hasil Perikanan
Dari KKP ke INSW dan dari INSW ke KKP

KESIMPULAN

1. Para pengusaha Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL) mengatasnamakan ARLI mengusulkan bahwa sertifikasi HACCP untuk produk rumput laut berupa bahan baku dalam bentuk kering (raw non food) tidak bisa disamakan dengan HACCP untuk tujuan konsumsi
2. Berkenaan usulan tersebut Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu menampung dan sedang mendiskusikan dgn tim teknis pusat terkait Sertifikasi HACCP Produk Rumput Laut (Raw RL non food)
3. Kepala BPPMHKP menegaskan untuk selalu menjaga K3 dgn semua stakeholder terkait untuk menjaga kelancaran ekspor rumput laut
4. Dalam Hal kegiatan ekspor hasil perikanan termasuk rumput laut kering dibagi dalam 2 bagian penjaminan mutu, yaitu Border (BPPMHKP) dan Post Border (BARANTIN)
5. Kedepan seluruh ekspor hasil perikanan termasuk rumput laut UPI/UPRL akan diberikan SKIHP (Sertifikat Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan) dan selanjutnya SPM (surat persetujuan muat) akan dihapus
6. Selanjutnya hasil K3 dgn Barantin, terkait ekspor Rumput Laut kering BARANTIN akan mengeluarkan sertifikat karantina ikan dan sertifikat phytosanitary
7. Untuk melayani pengusaha baru yg akan melayani sampel produk ke buyer tetap akan dilayani pemberian Sertifikat kesehatan (HC) namun harus dikomunikasikan sebaik2nya dgn buyer bahwa tanpa sertifikat HACCP dipastikan aman sampai di negara tujuan
8. Sehubungan dgn pelayanan sertifikasi SKP dan HACCP Kedepan dalam satu badan yaitu BPPMHKP maka kebijakan Ibu Kepala Badan 2 sertifikasi ini akan di jadikan satu kegiatan utk menerbitkan 2 sertifikasi sekaligus.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Terima Kasih.



BerAKHLAK²
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pengakuan Negara Tujuan Ekspor (Negara Mitra) Secara De Jure

NO	NEGARA	JUMLAH UPI TERDAFTAR	LEGAL BASIS
1	UNI EROPA	176	CD 94/324 (19 May 1994)
2	KOREA	629	MRA (2005)
3	CHINA	448	Cooperation Agreement (2008)
4	EURASIAN ECONOMIC UNION (EEU)	15	MRA (2009)
5	KANADA	316	MoU (2002)
6	VIETNAM	559	Implementing Agreement (2011)
7	NORWEGIA	176	MRA (2013)
8	SAUDI ARABIA	58	MoU (2020)



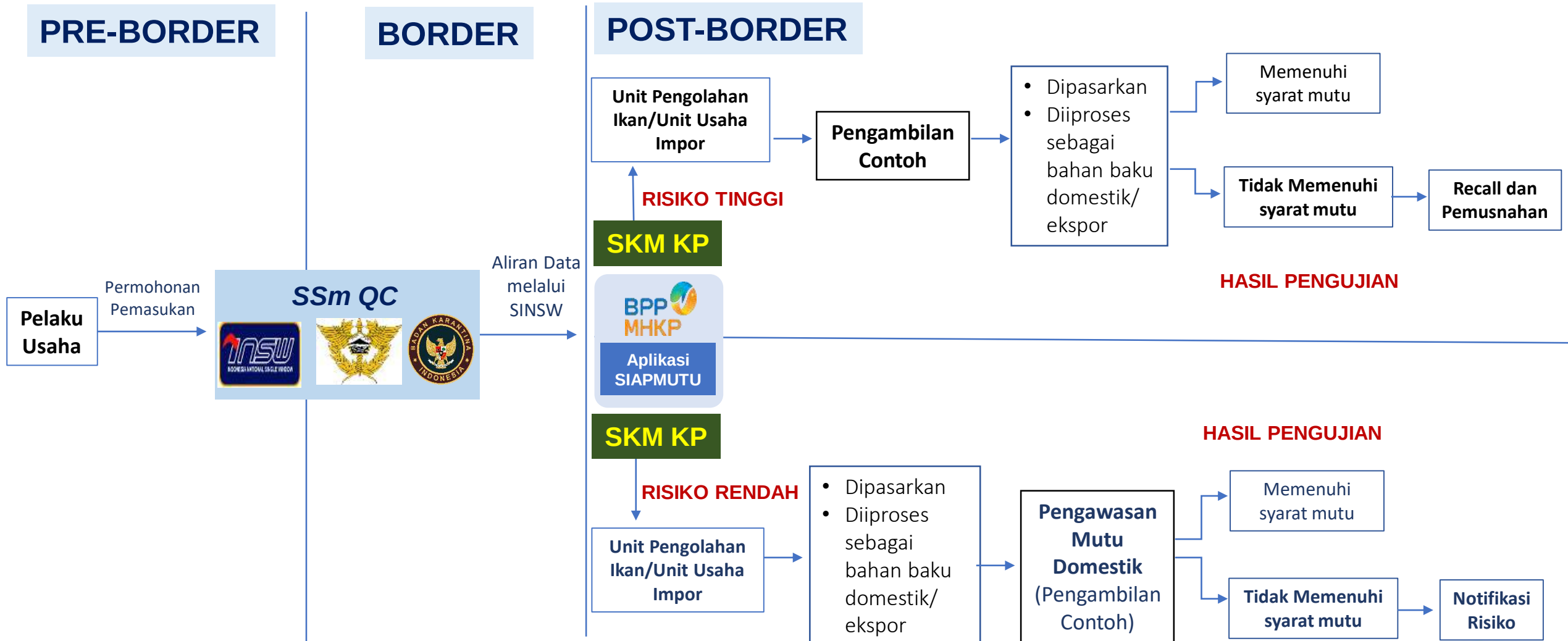
Pengendalian Mutu EKSPOR Bagi KKP sebagai Otoritas Kompeten SISJAMU

1. **Persyaratan Internasional** : pertanggung jawaban Otoritas Kompeten terhadap mutu dan/atau keamanan Hasil Perikanan yang diperdagangkan di pasar internasional
2. **Peran SKIHP di negara tujuan ekspor** :
 - a. SKIHP dokumen legal atas pertanggungjawaban Otoritas Kompeten SISJAMU kepada pemerintah dan konsumen di negara tujuan ekspor
 - b. Alat komunikasi antara Otoritas Kompeten negara eksportir dan importir
 - c. Alat komunikasi antara produsen-buyer
3. **Apabila terjadi penahanan/penolakan di negara tujuan ekspor, maka OK bertanggung jawab**:
 - a. Penyelesaian kasus mutu dengan negara importir
 - b. Menelusuri penyebab/akar permasalahan penahanan/penolakan
 - c. Melaporkan kepada negara importir tentang penyelesaian
 - d. Perbaiki sistem jaminan mutu di unit usaha

Berdasarkan
SKIHP

PROSES BISNIS :

Pengendalian IMPOR dalam rangka Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan





Pengawasan Mutu IMPOR Bagi KKP sebagai Otoritas Kompeten SISJAMU

1. Tanggung jawaban KKP sebagai Otoritas Kompeten:

- Menjamin mutu/keamanan produk impor yang dipasarkan di dalam negeri untuk konsumsi Masyarakat
- Menjamin mutu/keamanan bahan baku ekspor yang berasal dari produk impor (akan diperdagangkan di pasar internasional)

2. Peran KKP :

- Melakukan kajian risiko (di *pre-border*) berdasarkan : negara asal, eksportir, komoditi dan importir (risiko tinggi dan rendah)
- Melakukan pengawasan mutu sebagai pertanggungjawaban sebagaimana point 1 (sesuai Tingkat risiko pada poin 2.a)
- Hasil pengawasan mutu : sebagai dasar *Pre-Border Inspection* di negara asal

Berdasarkan
Aliran data dari
SINSW

3. KKP telah memiliki Harmonisasi SISJAMU dengan 38 negara di dunia (Negara MITRA):

- Sistem Inspeksi
- Format HC (ekspor dan impor) telah disepakati dalam MRA/MoU

4. Dalam hal point 2, impor dari negara NON Mitra : perlu memasukkan unsur mutu dan/atau keamanan hasil perikanan (APAKAH PERLU dicantumkan di sini...??)





Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Berbasis HS Code BTKI 2022

Produk KP Olahan Konsumsi

02.10 Daging Reptil (paha Kodok)
03.09 Tepung Konsumsi
12.12.21 Rumpot Laut
13.02 Agar & Karageenan
15.04 Minyak Ikan
16.03 Ekstrak Ikan/Krustacea/
Moluska/Invertebrata
16.04 Ikan diolah/ diawetkan
16.05 Krustacea/Moluska/ Invertebrata
diolah/diawetkan
19.01 Kerupuk
19.02 Pasta isi Ikan
21.03 Saus Ikan
03.04 Fillet/Daging Segar/Dingin/Beku
03.02 Ikan Segar/Dingin
03.03 Ikan Beku
03.05 Ikan Kering/Asin/Asap

Produk KP Olahan Non Konsumsi

23.01 Tepung Non Konsumsi
05.11 Produk non Konsumsi
23.09 Makanan Hewan

Produk Hidup :

01.06 Reptil
03.01 Ikan (ikan konsumsi,, benih, induk)
03.06 Crustacea (konsumsi dan non konsumsi)
03.07 Molusca (konsumsi dan non konsumsi)
03.08 Invertebrata (coral, dll)

Produk KP Non Olahan (konsumsi dan non konsumsi)

12.12.29 Rumpot laut
03.02 Ikan Segar/Dingin
03.03 Ikan Beku

❖ **Pengeluaran : 487 HS Code**

❖ **Pemasukan : 459 HS Code**



Catatan:

- Khusus HC Karantina Ikan
- HC mutu

PROSES BISNIS

Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Pembinaan

DJPT

Pembinaan terhadap penerapan CPIB di kapal dan HACCP di kapal.

DJPB

Pembinaan terhadap penerapan CPIB dan CBIB di pembudidaya, Cara pembuatan pakan dan Obat Ikan, Cara distribusi obat ikan.

PDS

Pembinaan terhadap persyaratan dasar (SKP), dan cara distribusi ikan yang baik.

PKRL

Pembinaan terhadap produk/hasil kelautan.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN
(tanpa penerbitan sertifikat)

Pengendalian dan Pengawasan

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan perikanan

1. **Sertifikasi di tahap Produksi Primer Budidaya:** CPIB (pembenihan), CBIB (pembesaran), CPPIB (pakan), CPOIB (obat ikan), CDOIB (distribusi obat ikan).
2. **Sertifikasi di tahap Produksi Primer Tangkap:** CPIB kapal pendingin, CPIB *based on* HACCP kapal pembeku, monitoring pembongkaran ikan.
3. **Sertifikasi di tahap Pasca Panen:** SKP di UMKM dan UPI, HACCP di UPI dan supplier, Cara Distribusi Ikan yang Baik.
4. **Sertifikasi mutu dan keamanan produk** (*Health Certificate*).
5. **Pengendalian ketertelusuran** (*traceability*) mutu dan keamanan hasil KP.
6. **Pengendalian importasi produk** kelautan dan perikanan konsumsi.
7. **Pengelolaan manajemen mutu laboratorium** (penguji dan acuan) dan jejaring laboratorium.
8. **Harmonisasi SJMKHP:** kerjasama (nasional dan internasional), registrasi ke negara mitra, penanganan kasus mutu, dan keamanan hasil KP.
9. **Monitoring:** kesegaran, perairan (*marine biotoxine*, logam berat, dll), mutu dan keamanan hasil KP di pasar domestik.



Rencana Program Pegendalian dan Pengawasan Mutu

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BLUE ECONOMY) 2021 - 2024



- 1 Perluasan wilayah konservasi perairan**
30% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2045
- 2 Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan**
untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan
- 3 Pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar**
dengan komoditas unggulan berorientasi ekspor (udang, lobster, kepiting, dan rumput laut) dan komoditas sesuai kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan
- 4 Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau Kecil**
sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- 5 Penanganan dan Pengelolaan Sampah Laut**
Dengan program Bulan Cinta Laut. untuk pencapaian sasaran pengurangan sampah laut 70% tahun 2030.

yang
diperkuat
dengan

- **Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas/mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor**
- Penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan teknologi satelit dan sistem karantina ikan
- Penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan

ARAH KEBIJAKAN

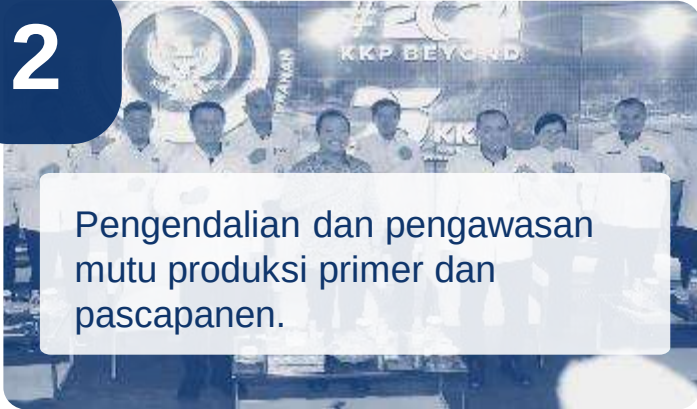
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

1



Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestic, impor, dan ekspor).

2



Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pascapanen.

3



Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional, dan pasar modern).

4



Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor.

5



Peningkatan kapasitas SDM pengendali mutu, prasarana dan sarana Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi di UPT BPPMHKP.

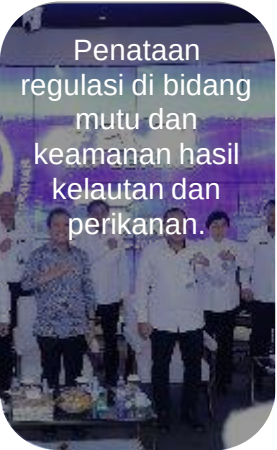
ROADMAP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

2024 & RPJMN I (2024 – 2029)



1

Penataan regulasi di bidang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



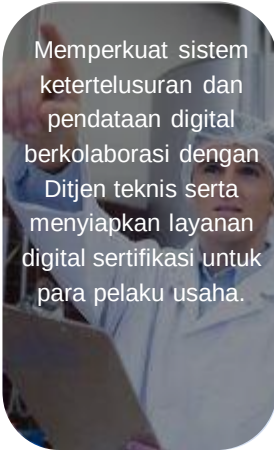
2

Melaksanakan Quality Assurance berbasis risiko.



3

Memperkuat sistem ketertelusuran dan pendataan digital berkolaborasi dengan Ditjen teknis serta menyiapkan layanan digital sertifikasi untuk para pelaku usaha.



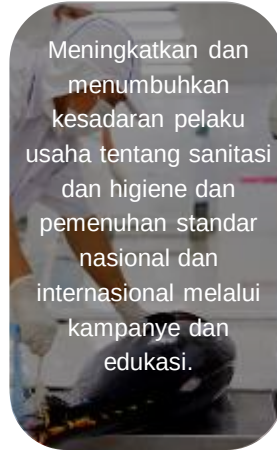
4

Melakukan pelatihan teknis Inspektur mutu kepada SDM pemerintah daerah yang secara fisik berdekatan dengan sumberdaya perikanan hulu dan hilir untuk membantu keterbatasan jumlah SDM di pusat dan UPT, serta melaksanakan crash program pengisian jabatan Inspektur Mutu.



5

Meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang sanitasi dan higiene dan pemenuhan standar nasional dan internasional melalui kampanye dan edukasi.



6

Membangun kemitraan dengan asosiasi, akademisi, lembaga penelitian, dan organisasi internasional.



7

Penambahan Approval Number Ke Uni Eropa





Dukungan BPPMHKP Dalam Mendukung Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota



Melaksanakan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Mutu

- Penguatan Sistem Sertifikasi di Hulu
- Penguatan Official Control : Inspeksi & Verifikasi di Pelabuhan perikanan, supplier/middleman
- Peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian logam berat dan histamin
- Monitoring cemaran perairan



Melakukan Fungsi Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Quality Assurance)

- Penerapan prinsip CPIB di Kapal, Pelabuhan / Tempat pendaratan ikan
- Penerapan prinsip CPIB pada Suplier ke UPI
- Implementasi sistim traceability mutu hasil perikanan tangkap



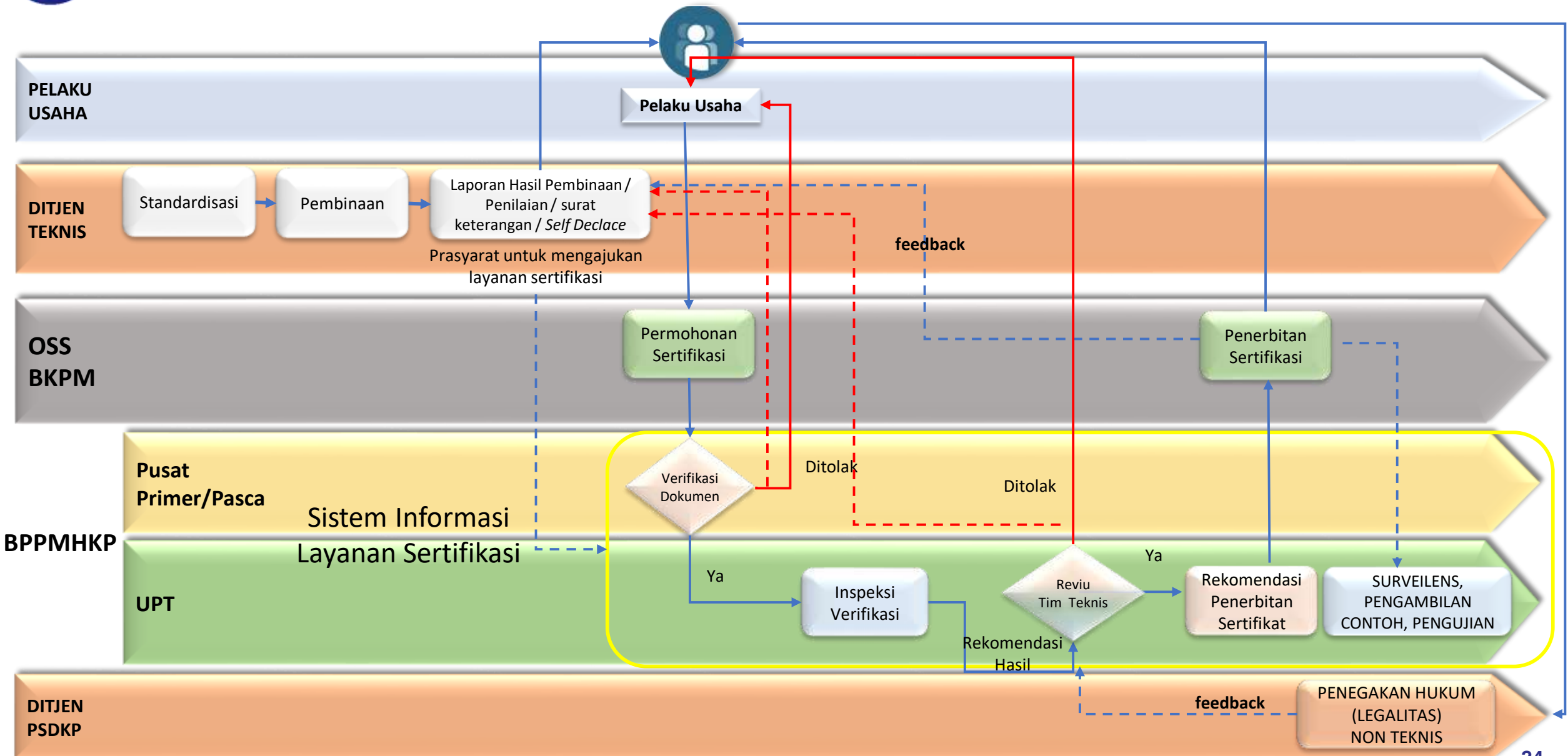
Menyelenggarakan dan Melakukan Fungsi Otoritas Kompeten Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan & Perikanan

- pembangunan dan pengembangan SJMKHP (Otoritas Kompeten, Harmonisasi)
- pengoordinasian penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia mutu dan KHP
- pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi



RANCANGAN PROBIS SERTIFIKASI MUTU HULU HILIR MELALUI OSS BKPM

(CPIB benih, CBIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, CPIB Kapal SKP, SPDI)





Tantangan dan Isu Permasalahan



Permasalahan

1. Semakin ketatnya persyaratan mutu dari negara tujuan ekspor untuk produk-produk perikanan yang akan diekspor.
2. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk melaksanakan pemenuhan persyaratan sertifikasi mutu, terutama di sisi hulu.
3. Belum terintegrasinya sistem penjaminan mutu hulu hilir sehingga menyulitkan ketertelusuran mutu produk.
4. Capaian sertifikasi masih rendah :
 - Sertifikasi CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) di atas kapal rata-rata baru <10%
 - Sertifikasi CBIB (Sertifikasi Cara Budidaya yang Baik) rata-rata baru 0,35%
 - Sertifikasi CPPIB baru terealisasi 25,44%
 - Sertifikasi obat ikan baru mencapai 24,84%
5. Moratorium Approval Number baru ke UE sejak tahun 2016
6. Sistem penjaminan mutu belum terintegrasi hulu hilir
7. Sarpras laboratorium dan pendukungnya belum memadai
8. Jumlah dan sebaran Inspektur Mutu masih kurang

Tantangan

- **produk hasil perikanan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan standard mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan pasar**
- **konsistensi implementasi sistem jaminan mutu hulu-hilir di setiap rantai produksi belum terintegrasi dan perlu ditingkatkan**

Faktor Kunci

Menjamin Konsistensi Penerapan Standard Sistem Jaminan Mutu pada Sektor Perikanan Primer



Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (70%)

Rencana Aksi

Monitoring Actions

- Memverifikasi penerapan standard sistem jaminan mutu hasil KP
- Menyusun basis data dan profil penerapan standard sistem jaminan mutu

Controlling Actions

- Menyusun kerangka hukum implementasi jaminan mutu
- Membuat rekomendasi tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh pihak terkait

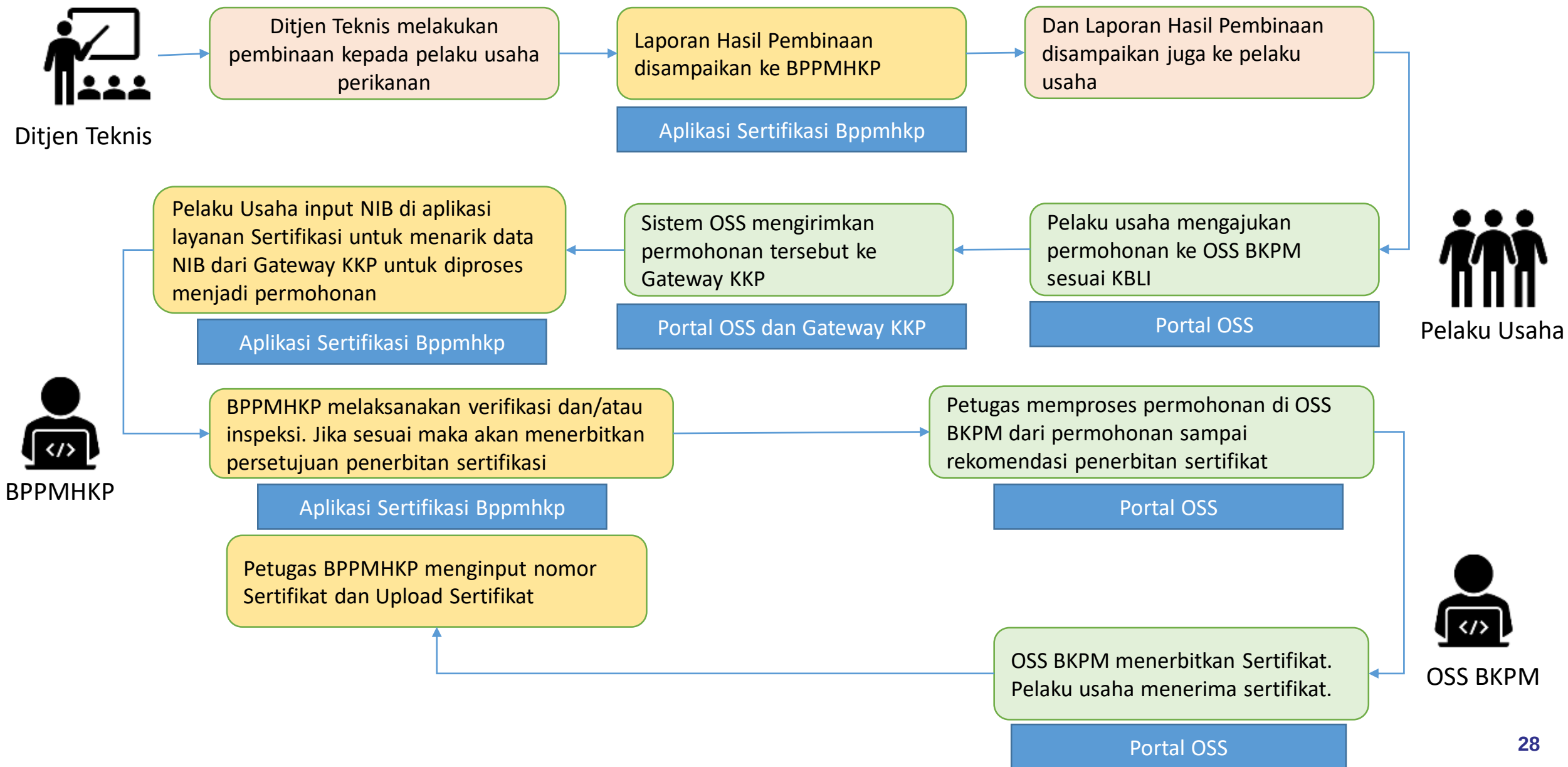
Survelaince Actions

- Memantau pemenuhan (compliances) rekomendasi tindakan perbaikan

Tantangan Pemenuhan Persyaratan Mutu Sektor Perikanan Tangkap

Persyaratan Mutu	ISU	Hal – hal yang perlu disiapkan
Ikan yang ditangkap ditangani dan disimpan sesuai standar dan memenuhi standar keamanan pangan	• Alat tangkap yang digunakan terlarang atau tidak ramah lingkungan (penggunaan TED) • Kapal memiliki ijin atau tidak • Daerah penangkapan (fishing ground) overfishing • ABK kapal (Hak Azasi Manusia) Pekerja Kapal • Penggunaan bahan kimia untuk penyimpanan (formalin) • Penyimpanan dan penanganan ikan di atas kapal yang tidak sesuai standar • Pembongkaran ikan • Ketertelusuran (<i>traceability</i>) • Biological substance (Salmonella, E Coli, V. Parahaemolyticus, L. Monocytogenes) • Physical Substance (Metal Fragment) • Natural Toxin (Histamin, Marine Biotoxin) • Heavy Metal (Cd, Pb, Hg)	• Pembinaan dan Sertifikasi CPIB Kapal • Pembinaan dan Sertifikasi HACCP Kapal • Pembinaan dan Sertifikasi Catch Certificate (CC) • Sistem ketertelusuran (<i>traceability</i>) • Penggunaan KAPI yang ramah lingkungan • Sertifikasi MSC

ALUR PROSES SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN



LANDASAN REGULASI

Pemenuhan persyaratan standar mutu dan keamanan pada kegiatan ekspor dan impor



01. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 15

Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran, jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan Sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

02. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 35

1. Setiap Orang yang mengekspor Pangan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan Gizi Pangan yang dipersyaratkan negara tujuan
2. Ekspor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat kesehatan produk

Pasal 86

1. Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
2. Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
3. Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
4. Pemerintah dan/atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

03. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamana Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Pasal 22

1. **Sertifikat kesehatan** Produk Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan yang telah memperoleh **sertifikat kelayakan pengolahan dan sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu..**
2. Sertifikat kesehatan produk Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali ekspor.
3. Untuk memperoleh sertifikat kesehatan Produk Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk

04. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Pasal 29

Pasal 1 : Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui penerapan system jaminan keamanan pangan dan mutu pangan

Pasal 3 : Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan system jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerapan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang mcnyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau Kepala Badan sesuai dengan kewcnangannya.

Pasal 30

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, atau bupati/wa1i kota sesuai dengan kewcnangannya dan/atau lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

04. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (lanjutan....)

Pasal 39

- 1) Setiap Pangan Segar asal ikan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan.
- 2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dengan melibatkan pemerintah daerah

Pasal 47, ayat (1)

Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk pangan segar dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di **bidang kelautan dan** perikanan, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya

Pasal 54

Ayat (1) : Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) untuk Pangan Segar dilakukan oleh pengawas Pangan yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, atau bupati/wali kota.

Ayat (3) : Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Inspektur Mutu, Pembina Mutu dan Pengawas Keamanan Pangan Segar yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan

04. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (lanjutan....)

Pasal 58

1. Dalam rangka pengawasan terhadap keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan dilaksanakan surveilan keamanan pangan
2. Surveilan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil risiko
3. Hasil pelaksanaan surveilan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan keamanan pangan
4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait surveilan Keamanan Pangan.

- 05.
- Permen KP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan HP
 - Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor KP
 - Permen KP Nomor 38 tahun 2019 tentang Pengeluaran MP dan/atau HP dan Permen KP Nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan MP dan/atau HP

Internastional Guidelines & Recognition Arrangements

- 06.
- FAO and WHO - CODEX Alimentarius Commission :**
- (CXC 1-1969) *General principles of food hygiene amended 2023*
 - (CAC/GL 82-2013) *National Food control systems*
 - (CXG, 20-1995) *Food import and export inspection and certification systems*

- 07.
- MRA (mutual recognition arrangement)** dengan negara mitra: Kanada, Tiongkok, Korea Selatan, Vietnam, Arab Saudi, EU (27 negara) dan EEU (5 negara)

Sertifikat HC/health certificate untuk Pengeluaran (ekspor)

- **HC sebagai penjaminan mutu dan keamanan** terhadap produk hasil perikanan untuk konsumsi dan ikan hidup konsumsi
- **HC sebagai penjaminan bebas penyakit ikan karantina** terhadap ikan hidup, ikan hias, tumbuhan akuatik hidup dan benda lain
- **HC sebagai penjaminan mutu dan keamanan serta bebas penyakit karantina**

Waktu Layanan

Maksimal 1 Jam 50 menit untuk layanan berbasis HACCP atau CKIB

Keterangan :

- tidak termasuk kegiatan pengawasan pemuatan/*stuffing*
- Dimulai dari sejak pengguna jasa mengupload dokumen persyaratan di PPK online dan dinyatakan lengkap oleh petugas sampai dengan sertifikat diterbitkan

Biaya Layanan Sertifikat HC ekspor

Sesuai PP 85 tahun 2021:

Per shipment

- PNBP per lembar sertifikat : Rp 25.000,-
- PNBP Uji Organoleptik : Rp 35.000,-/contoh (min 6 contoh, maks 24 contoh)

Periodik : PNBP Uji Laboratorium lengkap sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor

Sertifikat HC untuk Pengeluaran (ekspor)

- **HC sebagai penjaminan mutu dan keamanan** terhadap produk hasil perikanan untuk konsumsi, non konsumsi, ikan hidup konsumsi serta induk/calon induk dan benih

Waktu Layanan

Maksimal 1 Jam 50 menit (terdapat peluang percepatan layanan)

Keterangan :

- tidak termasuk kegiatan pengawasan pemuatan/*stuffing*
- Dimulai dari sejak pengguna jasa mengupload dokumen persyaratan di PPK online dan dinyatakan lengkap oleh petugas sampai dengan sertifikat diterbitkan

Biaya Layanan Sertifikat HC ekspor

Sesuai PP 85 tahun 2021 (masih dalam proses revisi):

Per shipment

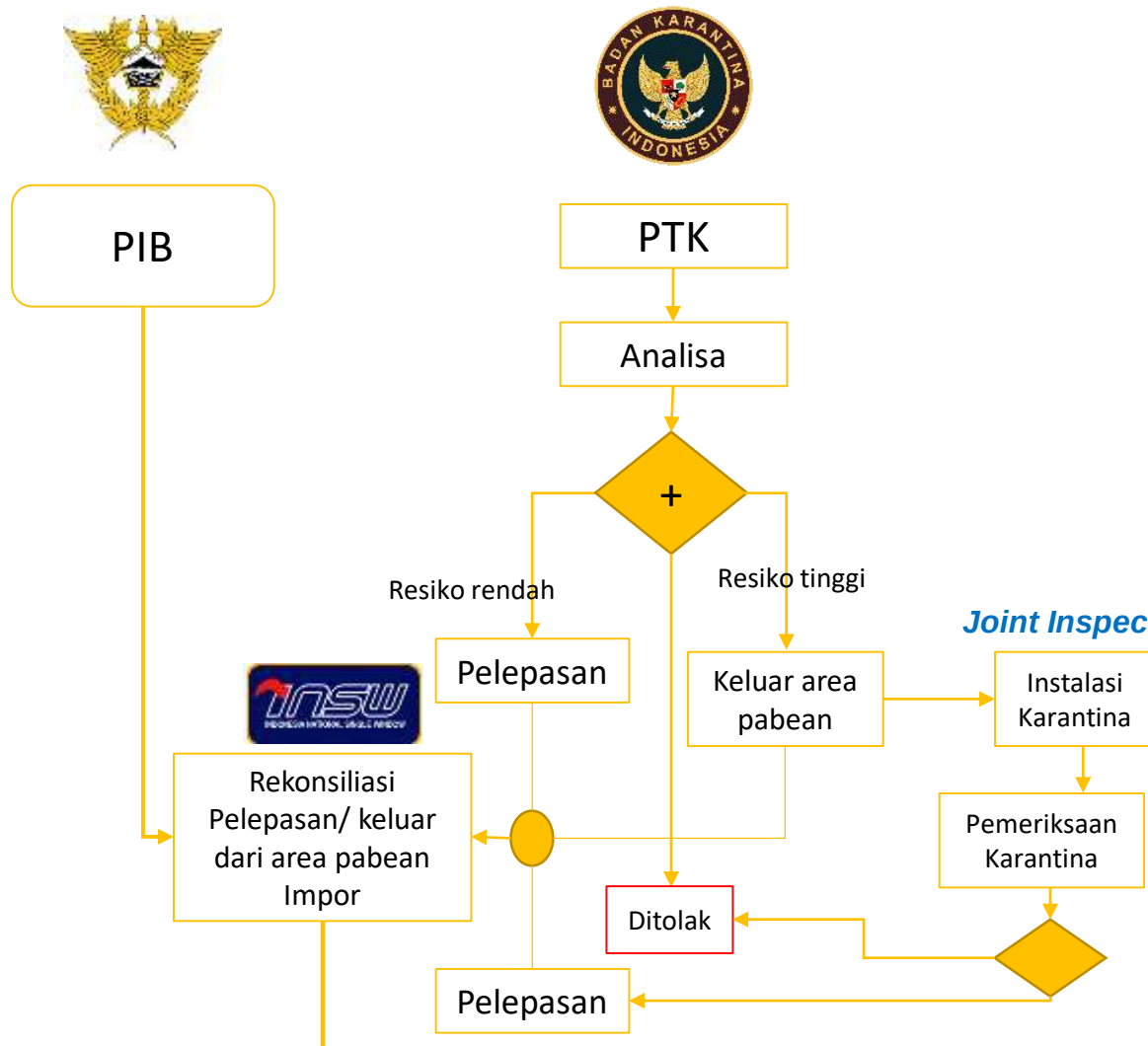
- PNBP per lembar sertifikat : Rp 25.000,-

Periodik

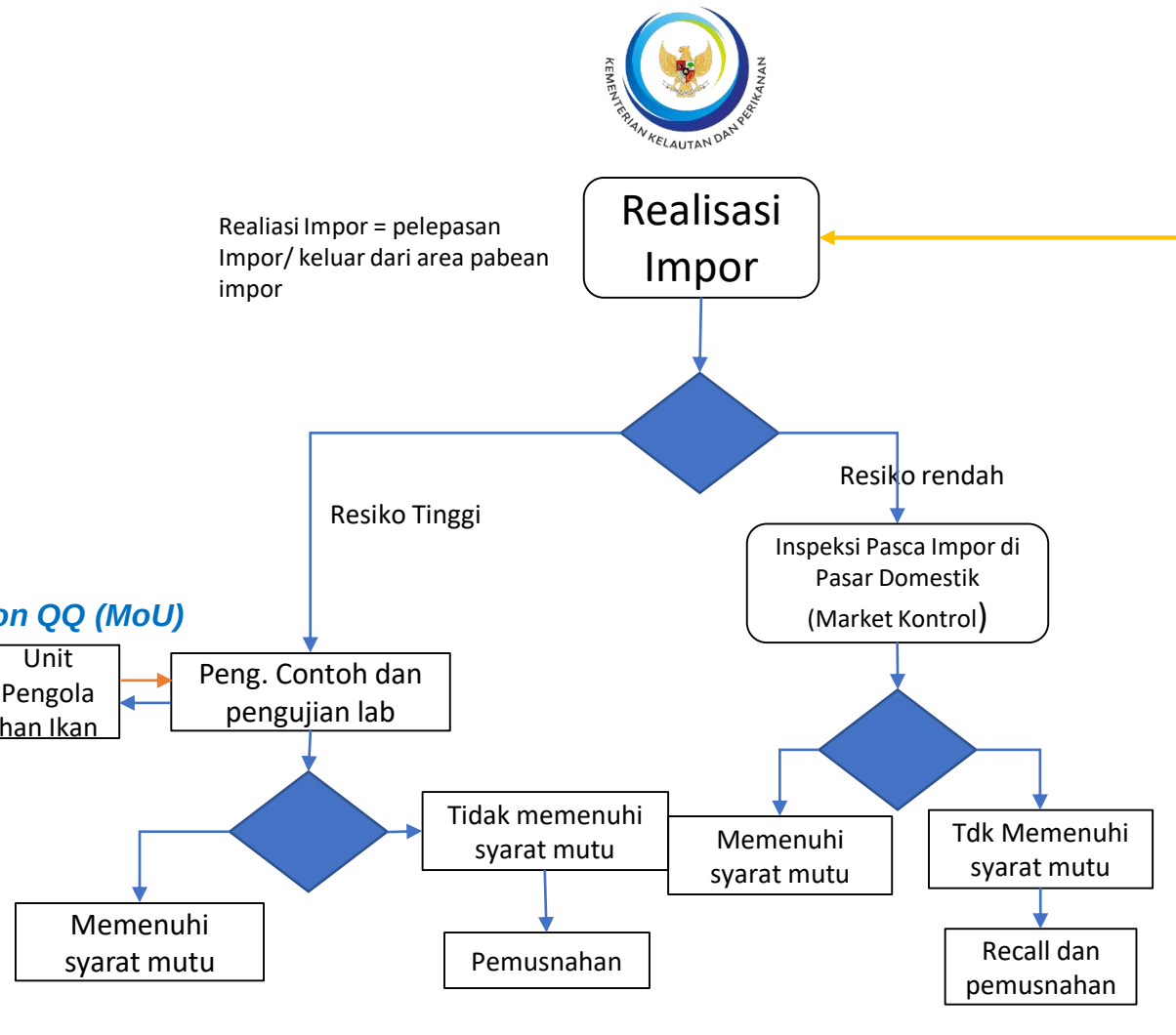
- PNBP inspeksi dan surveilan serta uji Laboratorium (mikrobiologi, kimia, organoleptik) sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor (frekuensi berdasarkan grade HACCP UPI)

Probis Impor Post Border

BORDER



POST BORDER



Joint Inspection QQ (MoU)

Unit Pengolahan Ikan



Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

MATERI KEGIATAN

“Pengenalannya Secara Umum terhadap MPHPI”

KEPENGURUSAN MASYARAKAT PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN INDONESIA

PERIODE 2023-2028



@mphpi_official



www.mphpi.com



@MPHPI_official

VISI DAN MISI

MPHPI 2023-2028

VISI

Menuju masyarakat pengolahan hasil perikanan yang semakin maju dan bermanfaat untuk kesejahteraan, dan keberlanjutan perikanan Indonesia

VISI

Membangun sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas masyarakat akademisi, birokrasi, dan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan hasil perikanan dengan dukungan kuat dari riset dan inovasi



TUJUAN

- 1** Membangun harmonisasi dan sinergi lintas stake holder perikanan yaitu kalangan peneliti, akademisi, birokrasi dan pelaku usaha di bidang pengolahan hasil perikanan
- 2** Menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri pengolahan ikan baik melalui riset/kajian ilmiah, penguatan regulasi, kerjasama ilmiah, dan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, serta hal lain yang dinilai perlu bagi kemajuan pengolahan ikan di Indonesia
- 3** Memperkuat hasil riset dan kajian ilmiah untuk meningkatkan daya saing usaha yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan keilmuan, industri, dan masyarakat pengolahan hasil perikanan
- 4** Menerbitkan journal ilmiah nasional/internasional, majalah terapan populer, dan publikasi media daring hasil-hasil riset, kajian ilmiah untuk kemajuan industri pengolahan hasil perikanan
- 5** Membangun kerjasama dengan perbankan dan pihak pendana lainnya dalam penguatan dan implementasi riset inovatif komersial untuk meningkatkan daya saing pengolahan hasil perikanan dan penciptaan lapangan kerja
- 6** Mendukung program pemerintah meningkatkan kapasitas SDM, inovasi produk, pembinaan mutu dan keamanan produk UMKM pengolahan perikanan
- 7** Melakukan kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, pameran ilmiah, dan sejenis lainnya untuk mendukung kemajuan pengolahan ikan nasional



KEANGGOTAAN MPHPI

Hak dan Kewajiban Anggota

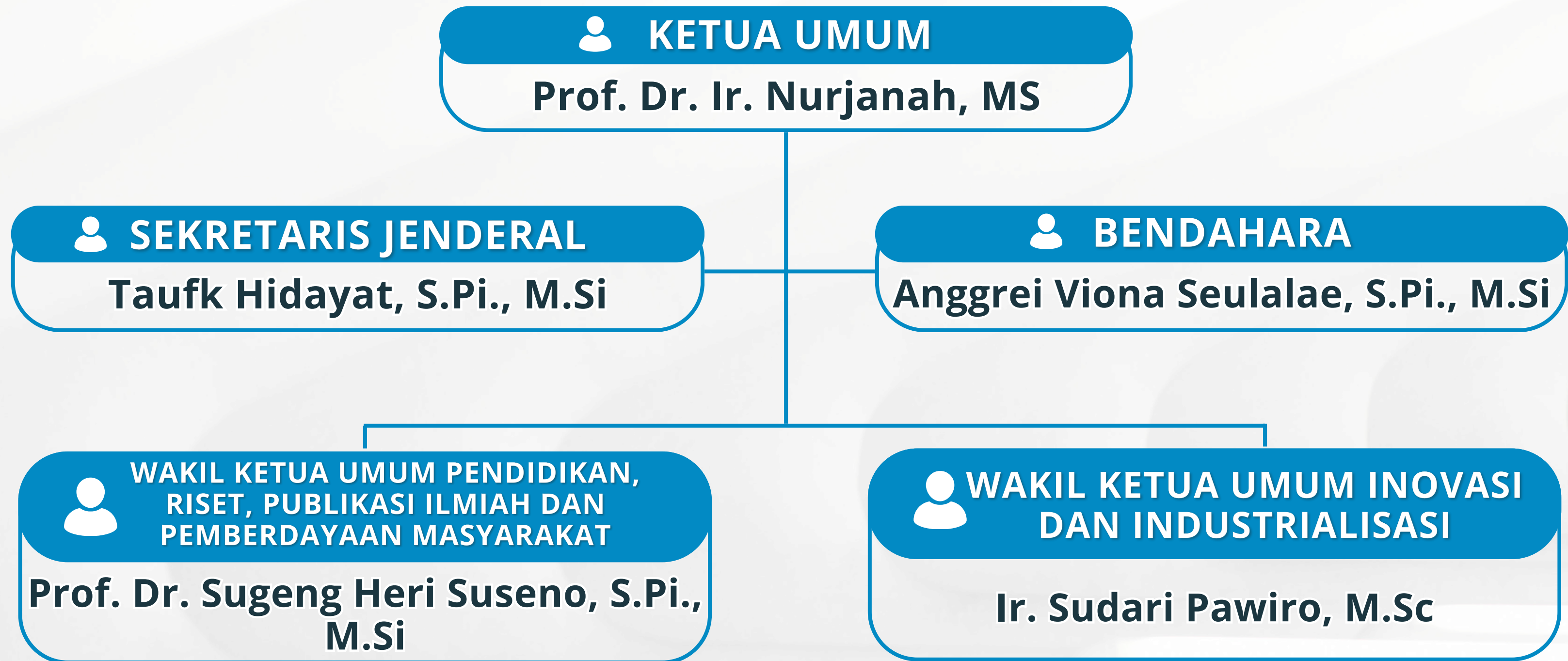
- Dapat menuliskan tulisan di website MPHPI
- Dapat mempromosikan produk di website dan media sosial MPHPI
- Berkontribusi dalam pemikiran untuk perkembangan industri pengolahan ikan melalui MPHPI
- Menjaga nama baik MPHPI
- Berkontribusi dalam iuran anggota MPHPI
- Mengikuti kegiatan MPHPI

Anggota MPHPI sampai dengan Juli 2024 =
412 orang



STRUKTUR PENGURUS MPHPI

2023-2028





**WAKIL KETUA UMUM PENDIDIKAN,
RISET, PUBLIKASI ILMIAH DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi.,
M.Si**



DIREKTUR RISET

**Dr. Wahyu Ramadhan,
S.Pi., M.Si**



**DIREKTUR AKREDITASI
DAN KURIKULUM**

**Prof. Dr. Tati
Nurhayati, S.Pi., M.Si**



**DIREKTUR PENERBITAN
JURNAL DAN MEDIA**

**Dr. Asadatun Abdullah
S.Pi., M.Si**



**DIREKTUR VOKASI
PENGOLAHAN HASIL
PERIKANAN**

Dr. Niken Dharmayanti



**DIREKTUR KOMPETENSI
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

**Aidil Fadli Ilhamdy,
S.Pi., M.Si**



@mphpi_official



www.mphpi.com



@MPHPI_official



**WAKIL KETUA UMUM INOVASI
TEKNOLOGI DAN INDUSTRIALISASI**

Ir. Sudari Pawiro, M.Sc



**DIREKTUR UMKM DAN
INDUSTRI KREATIF**

Dr. Latif Sahubawa



**DIREKTUR
PENGEMBANGAN
KEMITRAAN DAN AKSES
PASAR**

Hendra Sugandhi



**DIREKTUR HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA**

**Mgs. Muhammad Prima
Putra, S.Pi., M.Sc., Ph.D**



**DIREKTUR HARMONISASI
KEBIJAKAN MUTU,
SERTIFIKASI, DAN
STANDARDISASI PRODUK**

**Lia Sugihartini, S.Pi,
M.Eng., M.Sc**



**DIREKTUR INOVASI,
HILIRISASI DAN
KOMERSIALISASI PRODUK**

**Dr. Emma Rochima,
S.Pi., M.Si**



@mphpi_official



www.mphpi.com



@MPHPI_official

KORWIL SE-INDONESIA



PULAU SUMATERA



Aceh :

Anhar Rozi, S.Pi., M.Si



Sumatera Utara :

**Astrid Dewinta Fauziah, S.St.Pi.,
M.Si**



Sumatera Barat :

Leffy Hermalena, S.Pi., M.Si



Riau :

Dr. Sumarto, S.Pi., M.Si



Kepulauan Riau :

Dr. Sri Novalina, S.Pt., MP



Sumatera Selatan:

Prof. Dr. Ace Baehaki, S.Pi., M.Si



Bengkulu :

Venny Yuliastri, S.Pi., M.Si



Jambi :

Wulandari, S.Pi., M.Si



Bangka Belitung :

Kurniawan, S.Pi., M.Si



Lampung :

Debi Hardian, S.Pi., M.Si



@mphpi_official



www.mphpi.com



@MPHPI_official



KORWIL SE-INDONESIA



-  DKI :
Syamdidi, S.Pi, M.App.Sc
-  Banten :
Dr. Sakinah Haryati, S.Pi., M.Si
-  Jawa Barat :
Dr. Ir. Evy Liviawaty, MP
-  Jawa Tengah :
Ima Wijayanti, S.Pi., M.Si., Ph.D
-  Jawa Timur :
Prof. Dr.Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi., M.P
-  D.I.Yogyakarta :
Prof. Dr. Amir Husni, S.Pi., M.P



KORWIL SE-INDONESIA



PULAU KALIMANTAN



Kalimantan Barat :
Nani Nuraenah, S.Pi., M.Si



Kalimantan Timur :
Dr. Andi Noor Asikin, S.Pi., M.Si



Kalimantan Tengah :
Dr. Firlianty, S.Pi., MS



Kalimantan Utara :
H. Didit Adiputra, ST



Kalimantan Selatan :
Dr. Agustiana



KORWIL SE-INDONESIA



PULAU SULAWESI



Sulawesi Utara:

**Dr. Roike Iwan Montolalu,
S.Pi., MSc**



Gorontalo :

**Fernandy Rio Djailani, S.Pi.,
M.Si**



Sulawesi Tenggara :

Lely Okmawaty Anwar, S.Pi., M.Si



Sulawesi Tengah :

Yeldi S Adel, S.Pi., M.Si



Sulawesi Barat :

Kasmiati, S.TP., MP., Ph.D



Sulawesi Selatan :

Kasmiati, S.TP., MP., Ph.D



KORWIL SE-INDONESIA



PULAU NUSA TENGGARA



NTB:
Sudirman



NTT :
Firat Meiyasa, S.Pi., M.Si



Bali :
Siluh Putu Sri Dia Utari, M.Si



PULAU MALUKU



Maluku :
Prof. Dr. Ir. Fredrik Rieuwpassa, MS



Maluku Utara :
Prof. Dr. Ir. Fredrik Rieuwpassa, MS



PULAU PAPUA



Papua :
Muhammad Iksan Badarudin, S.Pi., M.Si



@mphpi_official

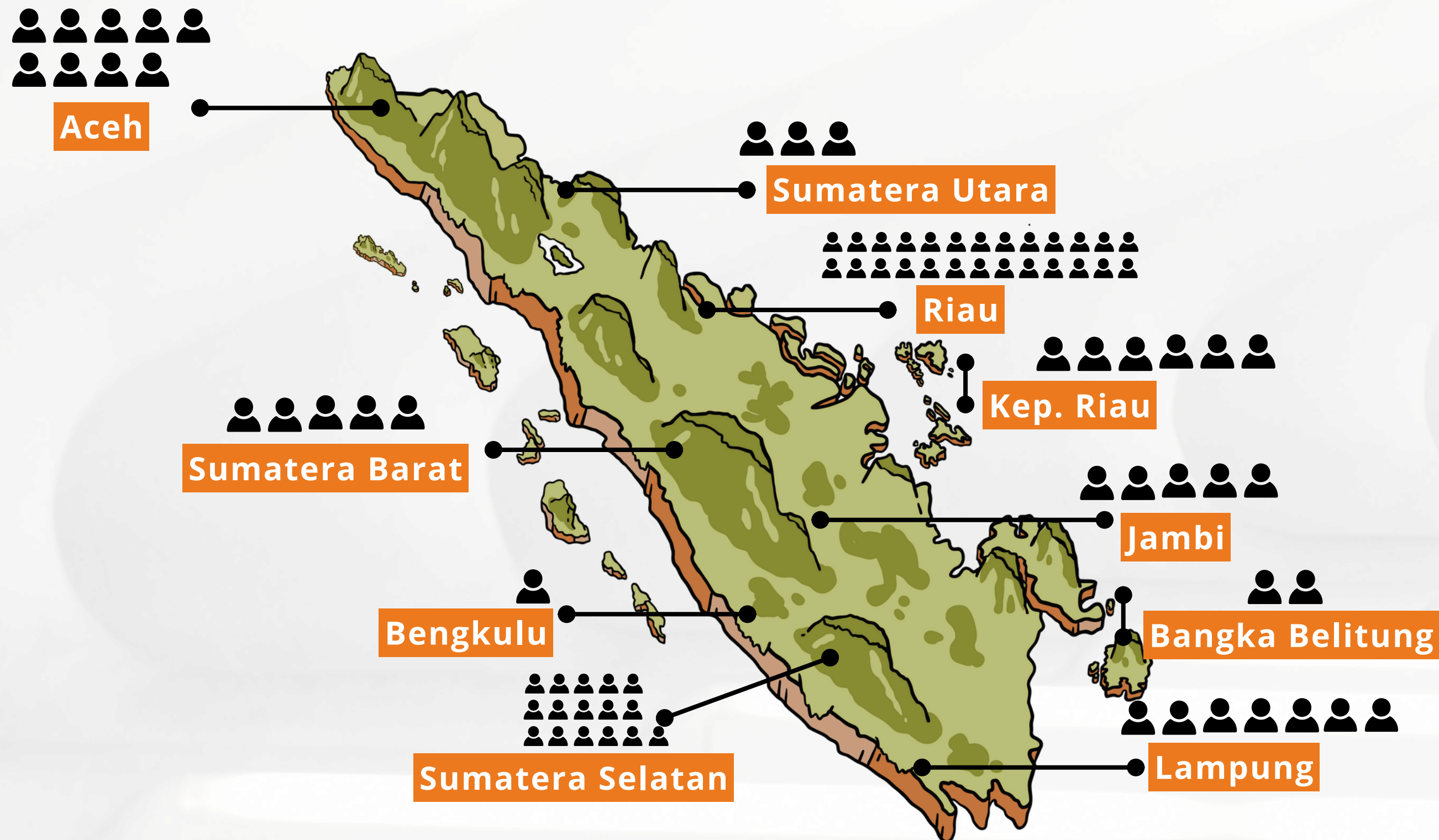


www.mphpi.com

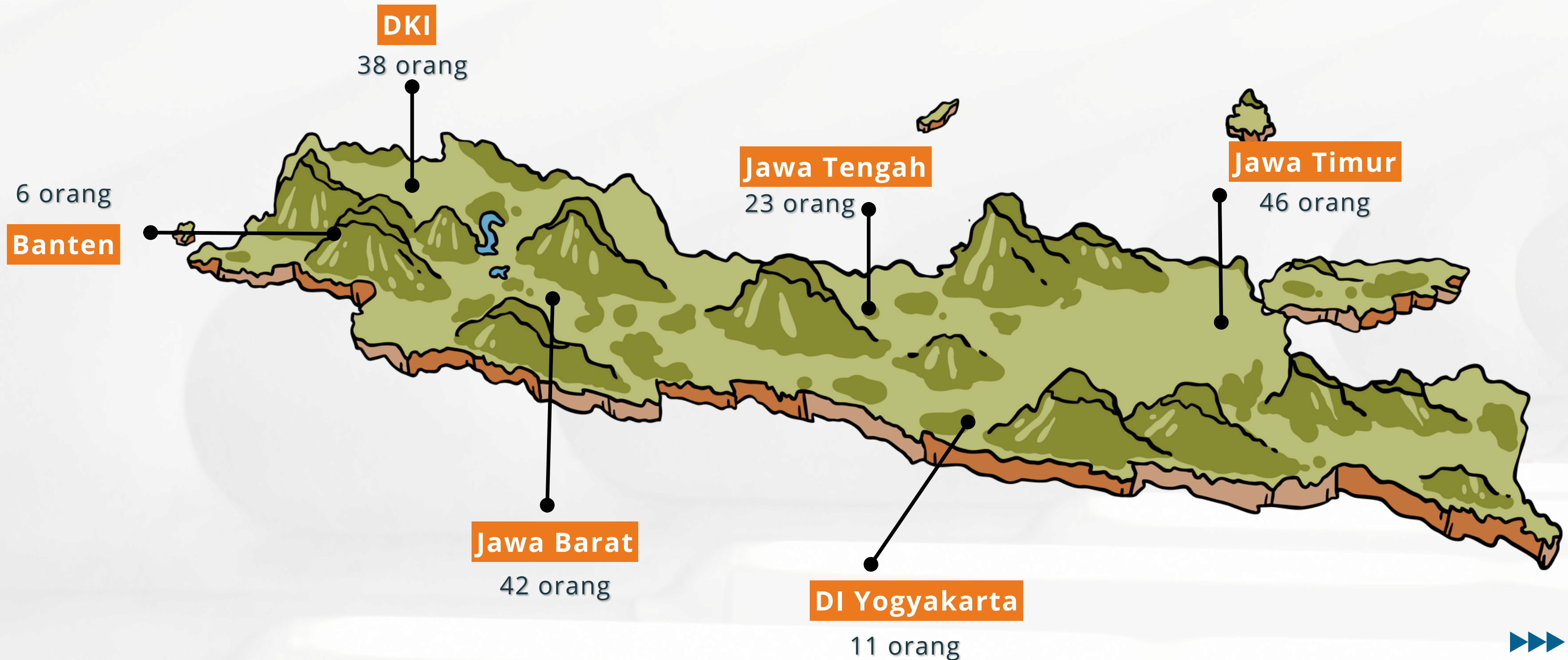


@MPHPI_official

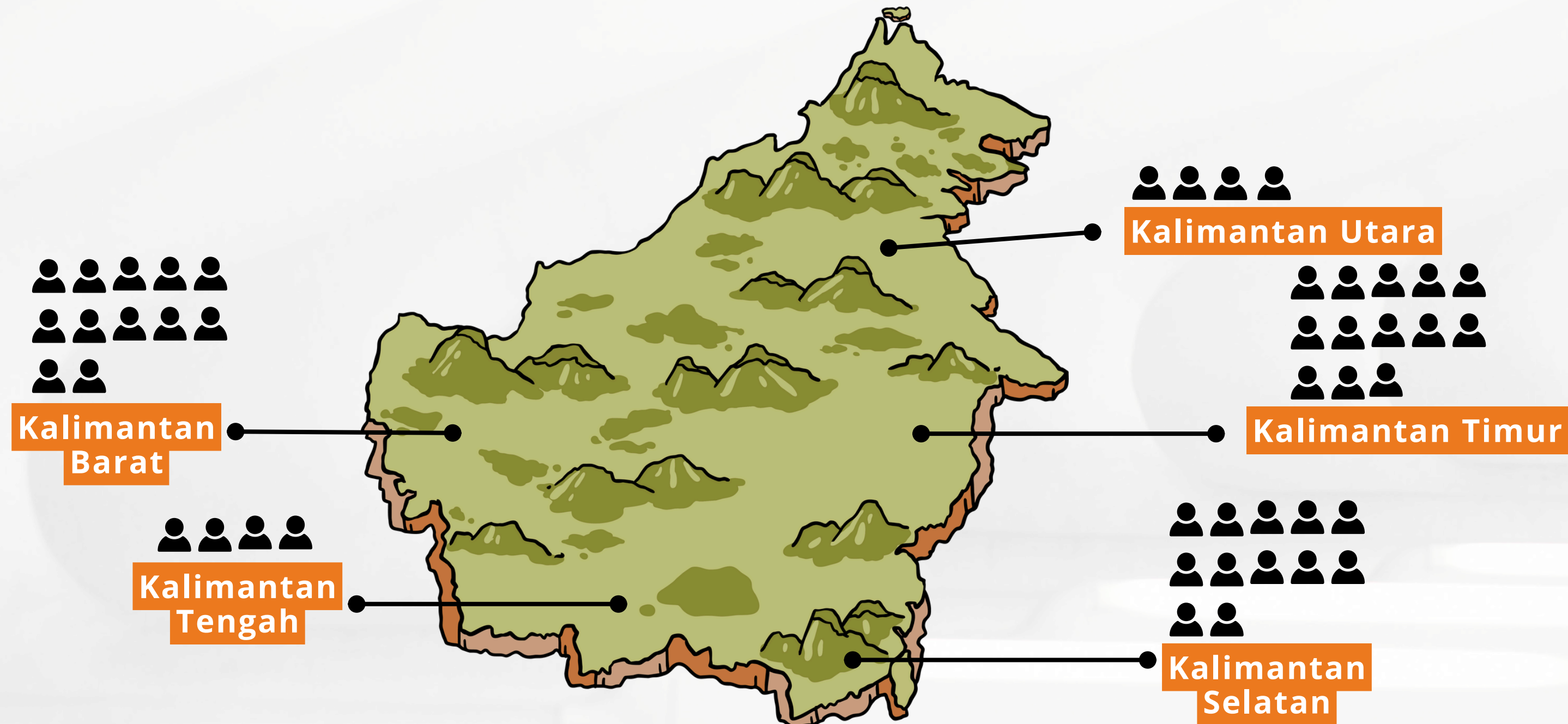
PEMETAAN ANGGOTA MPHPI



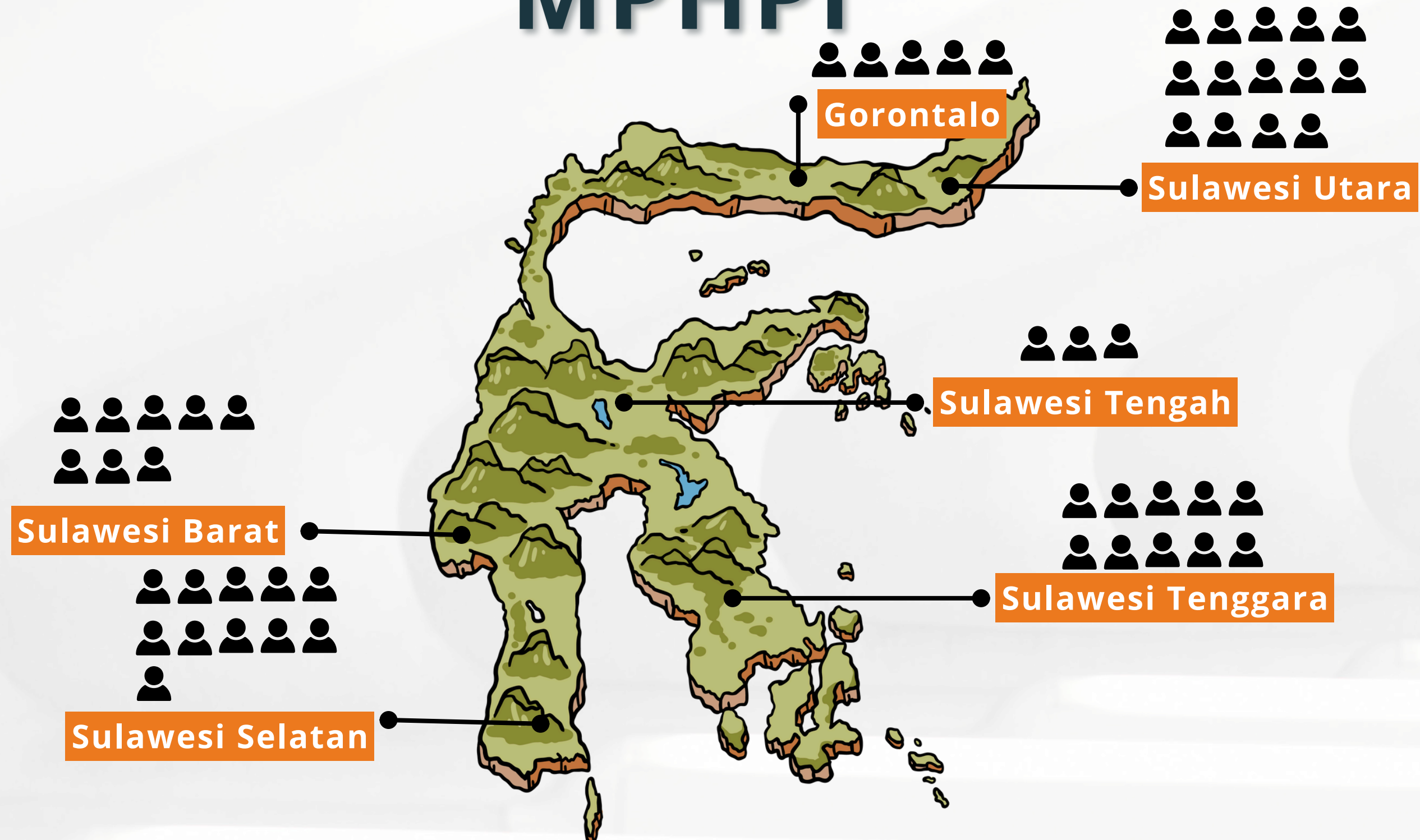
PEMETAAN ANGGOTA MPHPI



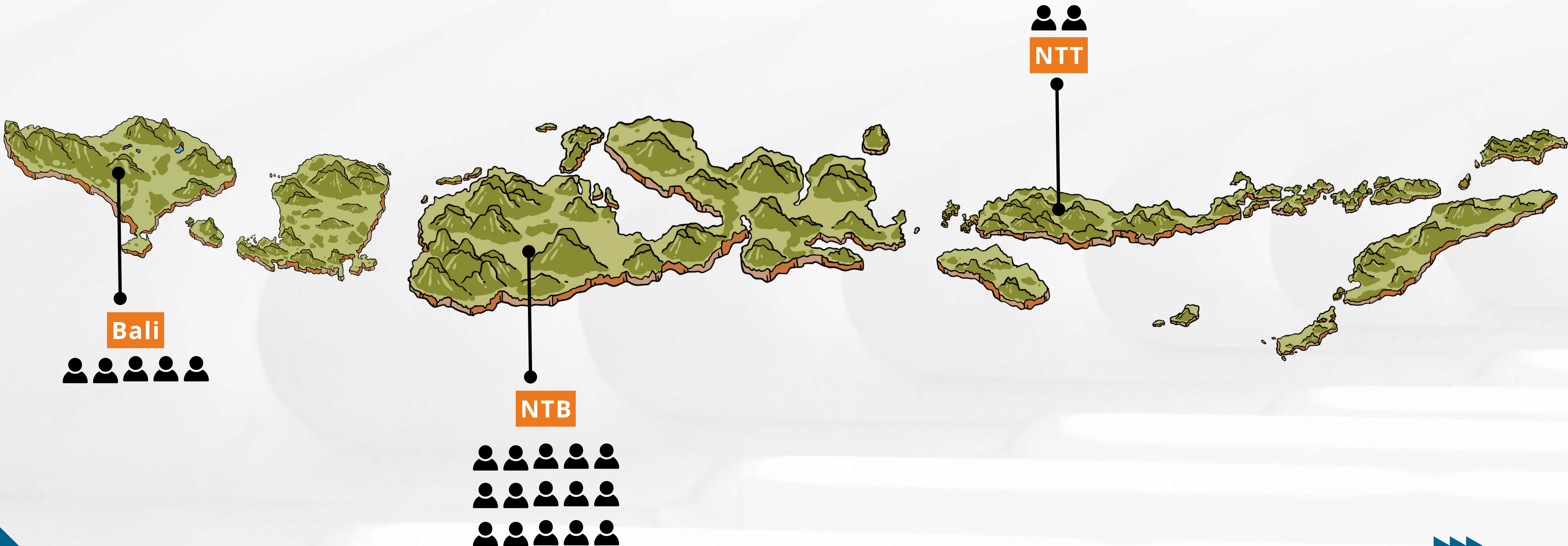
PEMETAAN ANGGOTA MPHPI



PEMETAAN ANGGOTA MPHPI



PEMETAAN ANGGOTA MPHPI



@mphpi_official



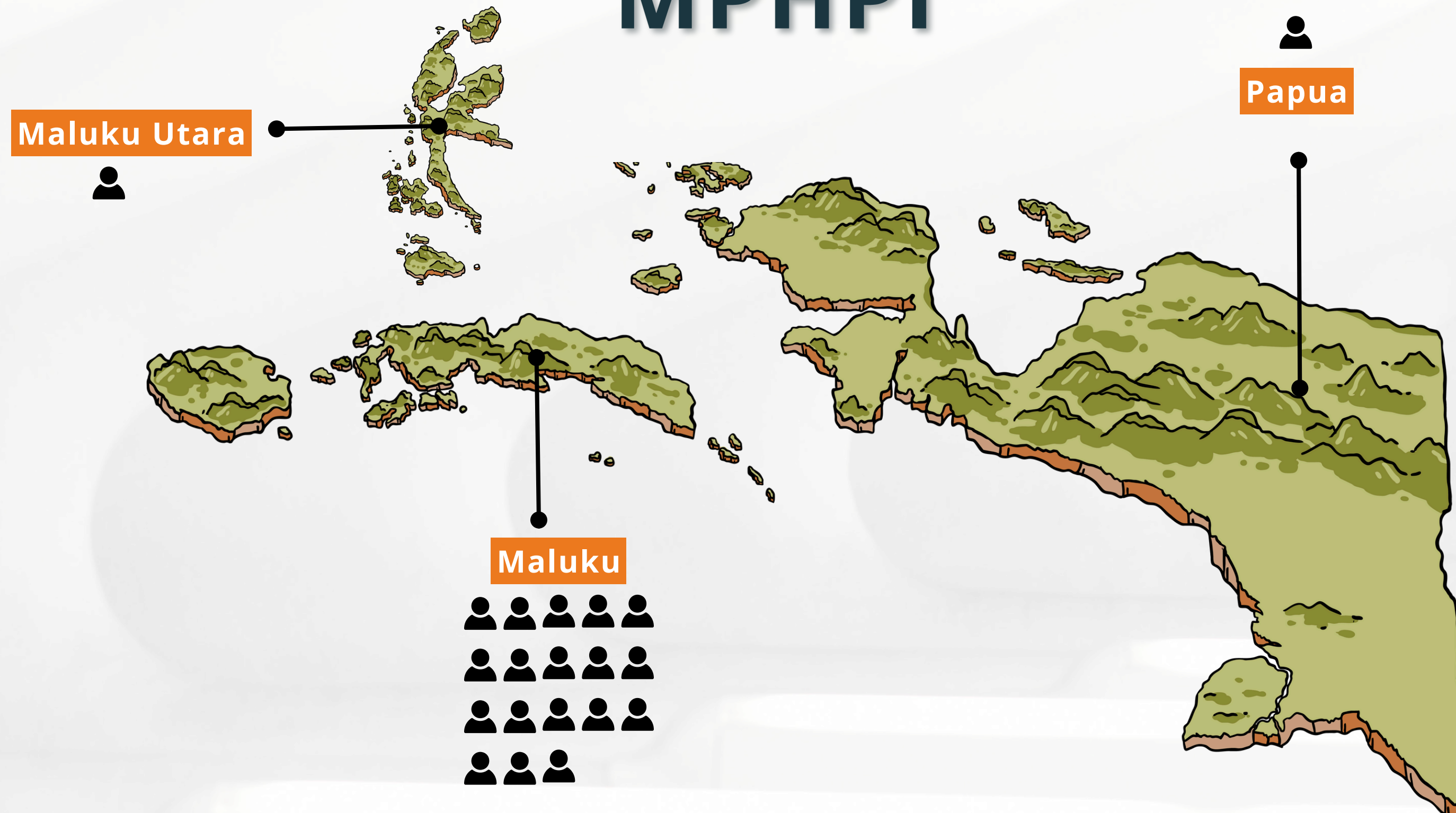
www.mphpi.com



@MPHPI_official



PEMETAAN ANGGOTA MPHPI



RENCANA PROGRAM UNGGULAN

01

MPHPI CARE

Dekat dengan umkm melalui pendampingan umkm, pengabdian masyarakat pesisir dengan pengaplikasian riset dan inovasi para anggota MPHPI, pelatihan pengolahan perikanan

02

MPHPI CONNECTIVITY

Seminar nasional dan internasional dalam rangka memperkuat silaturahmi anggota MPHPI dan jaringan; NgoBar Nasional dan Wilayah; Mitra strategis KKP dan BRI; Kunjungan Industri, PT, dan asosiasi lainnya

03

MPHPI STRENGTHENING

Pembentukan pengurus wilayah; peningkatan anggota MPHPI di seluruh indonesia berbasis *bottom up* dari wilayah



KICK OFF PENGURUS MPHPI 2023-2028

- Pelantikan Korwil se-Indonesia
- Pelantikan pengurus wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Riau
- Seminar Nasional Universitas Maritim Ali Haji
- Rapat koordinasi dengan agenda pelantikan korwil, pengurus wilayah Kepri, pembentukan pokja ad/art, renaksi program MPHPI 5 tahun
- Audiensi keseluruhan mitra strategis MPHPI
- Forum THP se-Indonesia
- Semnas MPHPI dan Pertemuan Ilmiah MPHPI Undap



TIM POKJA AD/ART

01

Memperbaiki dan Menyempurnakan ad/art yang disusun terakhir pada tahun 2021

02

Tim diketuai oleh sekjen MPHPI

03

Anggota tim : seluruh korwil



IURAN INTERNAL MPHPI

- Kartu anggota mphpi dengan kerjasama BRI sudah habis masa berlaku
- Kartu anggota MPHPI kedepan diusahakan elektronik, dilengkapi barcode
- Iuran per tahun harus didiskusikan kembali, dengan terbentuknya pengurus wilayah harapannya kegiatan di wilayah lebih aktif
- Pendaftaran anggota mphpi bisa melalui pengurus pusat dan wilayah, khusus wilayah, bisa mendata anggota baru yang ingin bergabung di MPHPI. Iuran dibayarkan sekali setahun sebesar Rp. 200.000.
Narahubung sekretariat : Lala (085156401453)



HARMONISASI DENGAN LEMBAGA LAIN : PT, Pemerintah (KKP, kemenperin, DPR), dan asosiasi lainnya

01

Kerjasama dengan Direktorat jendral PDSPKP masih berlangsung hingga tahun 2025

02

Kerjasama PT untuk akreditasi, kurikulum, dan penguatan vokasi

03

Inisiasi kerjasama PKS dengan BRI, Badan Mutu KKP, Dirjen PRL, Dirjen Agroindustri kemenperin

04

Kerjasama dengan asosiasi lain terkait industri pengolahan (MPN, ISPIKANI, IPKANI) dan juga NGO

05

Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi



SEMINAR NASIONAL DAN PERTEMUAN ILMIAH MPHPI TAHUN 2024



UNIVERSITAS PADJADJARAN






Seminar Nasional ke-15 dan Pertemuan Ilmiah ke-16 Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia

Universitas Padjadjaran 16-17 Oktober 2024

*Keberlanjutan Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan yang
Berdaya Saing melalui Hilirisasi dan Komersialisasi Produk*



KEYNOTE SPEAKER
Dr. Budi Sulistiyo, M.Sc
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan KKP RI



OPENING SPEECH
Prof. Dr. Ir. Nurjanah, MS
Ketua Umum MPHPI



INVITED SPEAKER
Prof. Dr. sc. agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Sc
Dekan Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Padjadjaran



INVITED SPEAKER
Hendra Sugandhi
Direktur Pengembangan Kemitraan
dan Akses Pasar MPHPI



INVITED SPEAKER
Prof. Dr. Ir. Junianto, MP
Guru Besar
Bidang Pengolahan Hasil Perikanan
Universitas Padjadjaran

Publikasi Artikel
Makalah terbaik dipertimbangkan untuk diterbitkan pada Jurnal
Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (Sinta 1, Scopus), Jurnal Akuatika
Indonesia (Sinta 3)

Ruang Lingkup Artikel

- Pengolahan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
- Keamanan Pangan dan Lingkungan Perairan, Kelautan dan Perikanan
- Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
- Rekayasa dan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
- Sosiologi dan Ekonomi Hasil Perikanan
- Manajemen dan Industri Perikanan

Pendaftaran dan Pengumpulan Abstract
22 Juli - 24 Agustus
Early Bird : 8 Agustus - 17 September

Pengumuman Abstract
30 September

Pelaksanaan Kegiatan
17 Oktober

Review Abstract
September

Pengumpulan PPT
deadline : 11 Oktober

Pengumpulan Makalah
deadline : 25 Oktober

Rangkaian Acara

Pertemuan Ilmiah MPHPI 16 Oktober 2024	Seminar Nasional 17 Oktober 2024	Gelar Inovasi Produk 17 Oktober 2024
--	-------------------------------------	--

Biaya Pendaftaran :

Partisipan	Umum	Rp300.000,00 - <i>Early bird</i> Rp350.000,00
	Mahasiswa	Rp200.000,00 - <i>Early bird</i> Rp250.000,00
Presenter	Umum	Rp600.000,00 - <i>Early bird</i> Rp750.000,00 Rp600.000,00 - <i>Hybrid</i>
	Mahasiswa	Rp250.000,00 - <i>Early bird</i> Rp300.000,00
Makalah Tambahan		Rp300.000,00

Pembayaran dapat dilakukan melalui
bank BNI 46 Cabang Unpad No Rekening : 0401550368
atas nama Ibu Emma Rochima.
Jika ada pembatalan sepihak , maka biaya pendaftaran tidak
dapat dikembalikan dalam bentuk apapun

Link Pendaftaran :
<https://s.id/SemNasMPHPI2024>



Contact Person
+62 852-2229-9082 (Asep Sahidin)
Sosial Media @mphpi_official

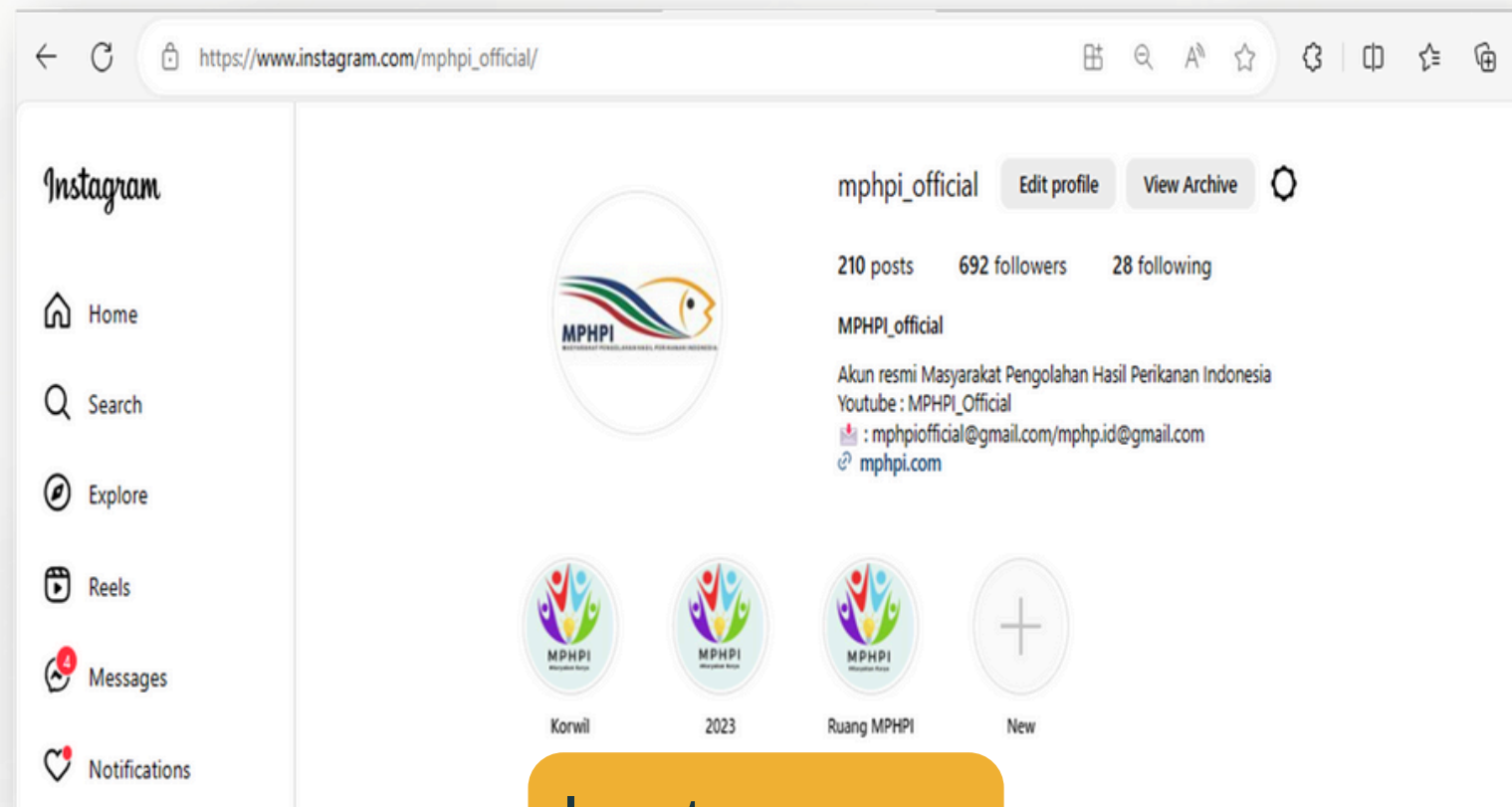


CALL FOR PAPERS SEMNAS DAN PERTEMUAH ILMIAH MPHPI 2024

INFORMASI LEBIH LANJUT LALA (085156401453)



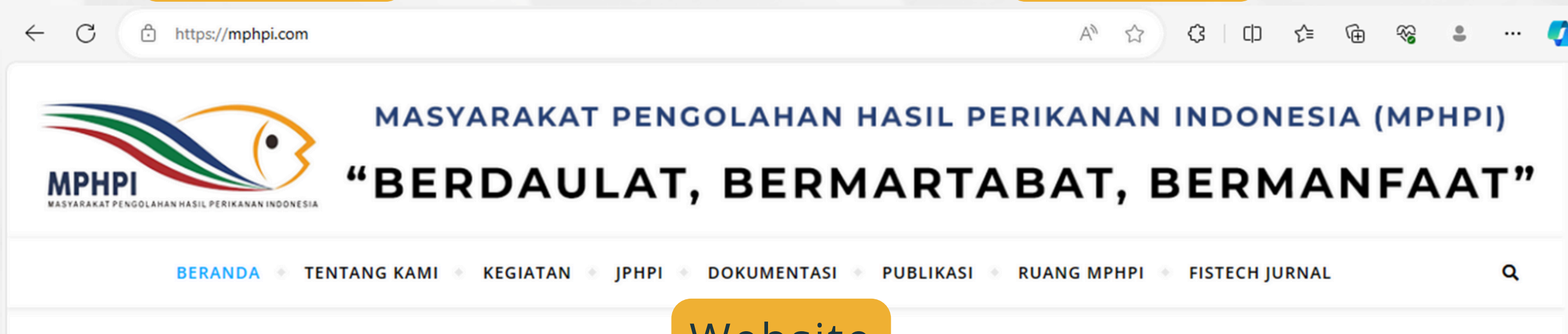
LAMPIRAN 1 AKUN MEDIA MPHPI



Instagram



Facebook



Website



T H A N K

Y O U

